

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Membentuk masyarakat yang cerdas tentu saja diperlukan adanya pendidikan yang layak bagi setiap masyarakat, Selain itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 juga disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan layak, maka diperlukan sebuah sistem yang mengatur tentang bagaimana proses berjalannya pendidikan. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional. Secara legal sistem pendidikan nasional diatur melalui Undang Undang Nomor 20 tahun 2003. Sistem pendidikan nasional dan otonomi daerah berjalan bersama sama dengan tujuan dapat menciptakan pemerataan akses pendidikan untuk semua daerah. Beberapa program pemerintah dalam perwujudan pemerataan pendidikan di Indonesia diantaranya adalah adanya perubahan dari wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Program ini diluncurkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang disiapkan untuk membentuk generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Program Wajib Belajar 12 Tahun ini juga di kenal

dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Pemerataan akses pendidikan merupakan tujuan program ini, dengan pemerataan akses pendidikan yang merata nantinya akan membawa manfaat bagi penduduk usia muda yang akan bersaing dalam dunia kerja. Hal ini mengingatkan bahwa semakin ketatnya persaingan di dunia kerja, menjadikan tingkat pendidikan masyarakat paling tidak berada pada tingkatan SMA dan SMK sederajat. Dengan berjalannya program ini maka nantinya Sekolah Menengah Atas dituntut untuk mengembangkan kualitas layanan pendidikan yang di miliknya. Kualitas layanan pendidikan dapat diukur dari prestasi yang diraih oleh sekolah dan hasil lulusan dari sekolah tersebut.

Kualitas pendidikan yang ada Indonesia secara keseluruhan bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari rangking dunia peringkat pendidikan yang dirilis oleh UNESCO. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report indeks pembangunan pendidikan atau *Education Development Index* (EDI) Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat 65 (Kompas.com, 2011) kemudian pada tahun 2011 turun ke peringkat 69 (Azhrmind.com, 2012), dan pada tahun 2012 naik ke peringkat 64 (Okezone.com,2013). Penilaian EDI tersebut diperoleh dari rangkuman perolehan 4 (empat) kategori penilaian, yaitu: angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa hingga kelas V (lima) sekolah dasar (SD).

Masalah pemerataan akses pendidikan memang sudah mengalami banyak perubahan, namun disisi lain yang masih menjadi masalah adalah pemerataan

kualitas pendidikan itu sendiri. Selama ini kualitas pendidikan yang baik hanya berpusat kepada kota kota besar. Di daerah di luar kota besar ini terkadang luput dari perhatian pemerintah. Kualitas pendidikan yang baik di tentukan oleh bagaimana proses pendidikan dan hasil pendidikan yang diperoleh. Proses pendidikan yang baik bisa di tentukan oleh input yang diberikan, metodologi pendidikan, sarana prasarana sekolah, dan dukungan administrasi serta sumberdaya sekolah lainnya. Kualitas pendidikan menurut pendapat Soeyatno (2006:4) menyatakan bahwa kualitas pendidikan faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan sekolah adalah kualitas guru, kualitas lulusan, dan kualitas kurikulum. kualitas guru dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya serta tingkat kedisiplinan dari guru tersebut, sedangkan hasil pendidikan ditentukan oleh hasil pendidikan atau prestasi sekolah dalam kurun waktu tertentu. Prestasi ini bisa dilihat dari hasil lulusan setiap tahun, prestasi akademik, dan prestasi non akademik.

Melihat hasil atau Output pendidikan yang ada di indonesia dapat dilihat dari hasil lulusan dari sekolah. Secara nasional beberapa tahun terakhir hasil kelulusan dari UN SMA/MA 2009/2010 siswa yang lulus sebanyak 1.368.083 (89,88%) siswa dan 154.079 (10,12%) siswa harus mengulang (imbalo.wordpress.com, 2010). Pada tahun selanjutnya UN SMA/MA Tahun Ajaran 2010/2011 siswa yang lulus sebanyak 1.450.498 (99,22%), sedangkan peserta yang tidak lulus 11.443 (0,78%) (Liputan6.com,2011). kemudian pada Tahun Ajaran 2011/2012 siswa yang lulus sebanyak 1.517.125 (99,50%) dan 7.579 (0,50%) peserta harus mengulang UN (safan.wordpress.com,2012). Jumlah

kelulusan UN SMA/MA pada Tahun Ajaran 2012/2013 siswa yang lulus sebanyak 1.573.036 (99,48) siswa, sedangkan yang tidak lulus berjumlah 8.250 (0,52%) siswa (antaranews.com,2013).

Masalah lain yang juga muncul dalam dunia pendidikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak mereka sehingga partisipasi masyarakat ini perlu ditingkatkan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional di kutip dari metrotvnews.com menyatakan bahwa “Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat Indonesia saat ini masih 78,7 % dan masih ada 13 % anak usia sekolah masih ada pada lulusan SMP, Sehingga APK SMA/SMK harus di tingkatkan. Pada tahun 2040 di target angka APK berada pada angka 97%” (Andika, 2013). Peningkatan APK ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah lulusan SMA/SMK sederajat yang siap bersaing di dunia kerja. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan layak serta mengatasi segala masalah yang ada di dunia pendidikan maka memerlukan dukungan dana, dimana dalam APBN anggaran pendidikan mengalami peningkatan mulai dari tahun 2004 hingga sekarang. Kenaikan anggaran pendidikan secara bertahap dengan rincian kenaikan 6,6% (2004), 9,29% (2005), 12,01% (2006), 14,68% (2007), 17,40% (2008), dan 20,10 % (2009) (Prasojo, 2012:19). Mulai Tahun 2009 hingga saat ini anggaran pendidikan berada pada kisaran angka 20%. adapun rincian dari anggaran pendidikan mulai tahun 2009 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Anggaran pendidikan Tahun 2009 - 2011

Tahun	Alokasi (Rp Triliun)	Ratio (% Terhadap anggaran)
2009	208,28	20,8
2010	225,23	20,0
2011	266,94	20,2
2012	310,80	20,2

Sumber : Media Indonesia dalam Supardi (2012:112)

Anggaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 20 %, anggaran sudah berjalan pada tahun 2013 sebesar Rp336,8 Triliun. Alokasi anggaran pendidikan tersebut diprioritaskan antara lain untuk:

1. Melanjutkan program BOS untuk meringankan beban biaya pendidikan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun bagi sekitar 45,0 juta siswa SD/MI/Salafiyah Ula dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha
2. Memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal, antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi sekitar 8,9 juta siswa SMA/SMK/MA, pembangunan 224 USB dan sekitar 6.900 RKB SMA/SMK/MA
3. Menyediakan beasiswa siswa dan mahasiswa miskin bagi sekitar 9,4 juta siswa/mahasiswa; Menyediakan dana tunjangan profesi guru Rp43,1 T;
4. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan rusak sedang untuk semua jenjang pendidikan. (APBN, 2013)

Dari alokasi 20% anggaran pendidikan tersebut dapat dilihat bahwa alokasi yang cukup menjadi perhatian adalah adanya tunjangan profesi guru atau yang sekarang lebih dikenal dengan program sertifikasi. Program sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru yang berposisi sebagai pendidik, sehingga dengan peningkatan kualitas pendidik ini diharapkan akan meningkat kualitas pendidikan pada tingkat menengah. Guru sebagai salah satu unsur dalam proses pendidikan memegang peran ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik.

Sebagai pengajar berarti memberikan sejumlah pelajaran ke anak didiknya, sedangkan sebagai pendidik bertugas untuk membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang kreatif dan mandiri, oleh karena itu, tugas yang di emban guru sebagai pengajar dan pendidik ini merupakan tugas yang berat yang hanya bisa di lakukan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan karena komponen lain dalam pendidikan tidak akan ada artinya jika interaksi antara guru dan peserta didik tidak berkualitas (Rachmawati, 2013:101). Secara umum kualitas guru di Indonesia masih berada pada kategori rendah, hal ini senada pernyataan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Kebudayaan (BPSDMPK) dan Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syahwal Gultom yang menyatakan

“ Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Kemudian dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat. Sedangkan 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional Selain tingkat pendidikan yang belum memadai, pada 2010--2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar (Antaraneews.com, 2013).”

Melihat pentingnya keberadaan guru dan meningkatkan kualitas guru tersebut maka perlu adanya standarisasi guru yang telah diatur dalam Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

Guru. Kompetensi Guru yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Pengertian dari kompetensi menurut Jackson and Schuler dalam Azhkezari (2012:62) adalah “*Competencies are defined as the skills, knowledge, abilities and other characteristics that someone needs to perform a job effectively*”. Kompetensi adalah seperangkat karakteristik, termasuk keterampilan, pengetahuan dan atribut, yang menyebabkan atau perkiraan kinerja. Kompetensi yang dimiliki oleh guru berasal dari dalam diri dan dari luar kondisi guru tersebut. Faktor dari dalam guru itu sendiri berasal dari bagaimana guru bersikap terhadap pekerjaan yang di lakukan. Sedangkan faktor dari luar lingkungan yang berada di sekelilingnya. Kinerja guru selain diukur dari kompetensi yang dimilikinya, dapat diukur pula dari tingkat kedisiplinan yang dimilikinya. Kedisiplinan merupakan suatu tindakan manajerial untuk menegakkan standar organisasi, sebagaimana yang dikatan oleh Newstrom dalam Utama (2010 : 14-15) “*Discipline is management action to enforce organization standarts*”. Kedisiplinan selain dilihat dari tingkat kehadirannya, tetapi juga dapat dilihat dari seorang guru memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik baiknya dan bermanfaat. Kompetensi dan kedisiplinan guru merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Jadi, dengan kualitas guru yang baik maka dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dengan signifikan.

SMA 1 Cepu merupakan salah satu yang berada pada kawasan paling timur di Provinsi Jawa Tengah. SMA 1 Cepu terletak pada perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora - Jawa Tengah. Sebagai SMA daerah pinggiran yang identik dengan sekolah yang

masih terbelakang dan belum mampu bersaing dengan SMA yang berada pada Kota Besar. Namun disisi lain SMA 1 Cepu mampu bersaing karena sejumlah prestasi yang di raih baik mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan mampu mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Sekolah ini hanya terdapat hanya 2 pilihan jurusan yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Dari lulusan yang ada selama 4 tahun terakhir hampir 80 % meneruskan ke perguruan tinggi dan 50 % nya di terima di Perguruan Tinggi Negeri (hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum).

Faktor penyebab yang menjadikan sekolah ini terdandang di tingkat kabupaten maupun provinsi ada adanya peningkatan kedisiplinan pendidik dengan penerapan absensi sidik jari elektronik. Dengan penerapan absensi elektronik ini bertujuan agar pendidik datang tepat pada waktunya dan menghindari pulang sebelum waktunya. Sehingga guru berada di sekolahan sesuai jam kerja nya. Tujuan lain dari penerapan absensi ini agar pendidik memiliki totalitas dalam mengajar dan memanfaatkan waktu selain jam mengajar untuk membuat bahan ajar maupun membuat hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya sebagai pendidik. Selain penerapan absensi elektronik, kompetensi pendidik juga menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan di SMA 1 Cepu. Kompetensi guru terdiri dari latar belakang pendidikan, penguasaan teknologi, pengalaman mengajar dan sertifikasi. Salah satu kompetensi dari pendidik ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang ada adalah hampir semua lulusan yang mengajar di sekolah ini merupakan lulusan Sarjana (S1) yang mengajar sesuai bidang yang ditekuninya. Beberapa

pendidik bahkan sudah ada yang merupakan lulusan magister (S2). Dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kabupaten Blora beberapa guru berperan pada posisi penting seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Dengan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“Pengaruh Kompetensi dan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah (Studi Kasus Pada SMA 1 Cepu Kabupaten Blora)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi tenaga kependidikan dengan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora ?
2. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kedisiplinan tenaga kependidikan dengan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora ?
3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama sama antara kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora ?
4. Diantara variabel kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan, variabel manakah yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kompetensi tenaga kependidikan dengan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara kedisiplinan tenaga kependidikan dengan kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara bersama sama antara kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora
4. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas layanan pendidikan.

D. Kontibusi Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain :

1. Manfaat Akademis.

- a. Sebagai bahan studi selanjutnya dalam administrasi publik terutama yang berkaitan dengan sumber daya tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari administrasi publik di bidang pendidikan.
- b. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan

terhadap kualitas layanan pendidikan.

- c. Sebagai bahan menambah wawasan tentang pengaruh kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi instansi terkait baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah bersangkutan dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi instansi terkait baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun sekolah terkait dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pendidikan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian serupa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun dalam 5 (lima) bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari laporan yang berisikan tentang *pertama*, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan

dengan kompetensi dan kedisiplinan tenaga kependidikan terhadap kualitas layanan pendidikan. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian serta yang akan menjadi variabel dan indikator. *Ketiga*, tujuan penelitian dimana berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori atau pendapat-pendapat serta konsep-konsep yang dapat mendukung dan berhubungan dengan topik penelitian sebagai landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan yang terdapat di dalam penelitian. Teori atau pendapat-pendapat serta konsep-konsep dalam bab ini merupakan kutipan dari berbagai ahli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian, dimana dalam bab ini membahas tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh dalam mengambil data yang termuat dalam jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, sumber data, validitas dan reliabilitas, dan analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan dan menyajikan data-data dari hasil penelitian dan menyajikan data hasil penyebaran kuesioner dan di analisis untuk menjawab hipotesis yang telah disusun menurut keperluan penelitian dan diinterpretasikan

sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Kompetensi dan Kedisiplinan Guru Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Pada SMA 1 Cepu Kabupaten Blora)”.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis data. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan pada ketidaksesuaian teori dengan kenyataan dilapangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Menurut Sjamsuddin (2006:1) pengertian administrasi secara etimologis kata administrasi berasal dari kata *administrare* dalam bahasa latin yang artinya “memberikan pelayanan kepada”. Dalam bahasa Inggris administrasi berasal dari kata “*administration*” (*to administer*), yang berarti merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Dalam bahasa Belanda kata administrasi berasal dari kata “*to administrare*” yang diartikan sebagai kegiatan yang mencakup penata usahaan dan manajemen.

Dipandang dari pendapat para ahli, pengertian administrasi menurut Liang Gie dalam Sjamsuddin (2006:9) menyebutkan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sondang P Siagian dalam Zauhar (1996:11) mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Terry dalam Sjamsuddin (2006:10) menyatakan bahwa pengertian administrasi adalah usaha

mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk mempergunakan orang lain. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui proses kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengertian Administrasi Publik

Waldo dalam Pasolong (2007:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia manusia dan peralatannya guna untuk mencapai tujuan pemerintah. Pengertian administrasi publik menurut Henry dalam Pasolong (2007:8) menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi publik adalah suatu proses kerja sama dari dua orang / organisasi atau lebih yang memerlukan kecakapan khusus yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara.

3. Unsur Administrasi Publik.

Didalam penerapan administrasi publik di dalamnya terdapat unsur unsur yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. The Liang Gie dalam Sjamsuddin (2006:18-21) menyebutkan bahwa terdapat delapan unsur administrasi yaitu : organisasi, manajemen, tata hubungan/komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha/perkantoran dan

perwakilan/hubungan masyarakat Dari delapan unsur yang ada dalam administrasi publik yang merupakan bagian utama sekaligus sebagai wadah individu didalamnya adalah organisasi. Sebagai unsur administrasi organisasi merupakan tempat yang didalamnya terdapat suatu proses yang berawal dari penyusunan bentuk dan pola usaha kerja sama penggolongan kerja yang harus di jalankan, pembagian wewenang dari masing masing pelaksana dan menentukan hubungan kerja sama yang seimbang serta bertanggung jawab. Selain Organisasi, manajemen juga memegang peranan sebagai sarana untuk berjalannya suatu organisasi.

B. Manajemen Pelayanan Publik

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata manus (latin) yang berarti tinggi, *mano* (latin) yang berarti tangan. Dalam bahasa Inggris manajemen berasal dari kata *management* yang berarti pimpinan, direksi, pengurus. Asal katanya to manage yang berarti mengemudikan, mengurus, memerintah, memimpin (Sjamsuddin 2006:21)

Menurut pendapat beberapa ahli seperti Stoner dan Wankel dalam Pasolong (2007:82) mendefinisikan manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Griffin dalam

Maisah (2013:1) manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh suatu sumber daya organisasi. Terry dalam Sjamsuddin (2006:22) mendefinisikan manajemen sebagai upaya mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan lain lain orang. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen merupakan suatu proses yang tersusun secara sistematis mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga proses pengawasan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Manajemen Publik.

Manajemen pada awalnya hanya digunakan pada sektor swasta, namun pada perkembangnya pemerintah berusaha untuk melaksanakan beberapa prinsip prinsip manajemen dalam pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi pemerintah. Sektor pemerintah atau yang sekarang dikenal dengan publik merupakan cakupan wilayah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian publik itu sendiri ditinjau dari etimologi berasal dari bahasa inggris yaitu "*public*" yang berarti umum. Menurut Frederickson dalam Pasolong (2007:6-7) konsep publik mempunyai 5 Perspektif yaitu :

- a. Publik sebagai kelompok kepentingan dimana publik dapat dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.

- b. Publik sebagai pemilih yang rasional dimana manusia terdiri dari individu – individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- c. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat yang diwakili melalui suara.
- d. Publik sebagai konsumen yang menuntut adanya pelayanan birokrasi. Publik sebagai warga Negara yang senantiasa ikut serta dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Overman dalam Pasolong (2007:83) berpendapat bahwa manajemen publik adalah studi interdisipliner dari aspek aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, dan controlling* satu sisi dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain. Secara singkat manajemen publik dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan swasta berperan sebagai penyedia layanan dan masyarakat berperan sebagai penerima layanan.

3. Manajemen Pelayanan Publik.

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Kurniawan dalam Pasolong, (2007:128), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian dari manajemen, manajemen publik, dan pelayanan publik maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pelayanan publik adalah suatu usaha dari pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada baik berupa barang, jasa atau bentuk lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Kepmenpan No. 63 tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Kelompok pelayanan administratif

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi

(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.

b. Kelompok pelayanan barang

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb.

c. Kelompok pelayanan jasa

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dsb.

C. Organisasi.

1. Pengertian Organisasi.

Secara etimologis organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *organon* yang berarti alat. Dalam bahasa latin disebut dengan “*organization*” . Dalam bahasa Prancis berubah menjadi “*organization*”. Pengertian dari organisasi menurut dari berbagai bahasa dapat diartikan sebagai bagian bagian yang tersusun dan terkoordinasi hingga mampu menjalankan fungsi tertentu secara dinamis.

Beberapa tokoh juga mengemukakan pengertian organisasi, seperti pengertian organisasi yang diungkapkan oleh Siagian dalam Sjamsuddin

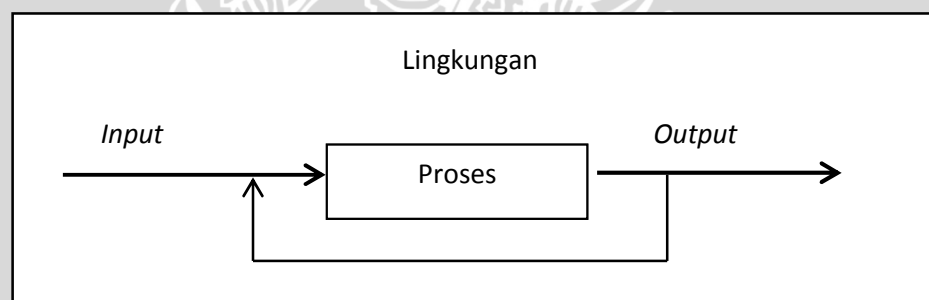
(2006:19) yang mengatakan pengertian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan nama terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut bawahan. Mills dan Mills dalam Raharjo (2011:4) yang menyatakan bahwa “*specific collectivities of people whose activities are coordinated and controlled in and for the achievement of defined goals*”. Organisasi merupakan sebuah usaha yang secara keseluruhan yang menyangkut aktifitas manusia yang terkoordinasi dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Robbins dalam Raharjo (2011:5) menyatakan bahwa pengertian organisasi adalah “*a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.*” Organisasi merupakan suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi dan berfungsi secara relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki unsur unsur penting yang diantaranya adalah memiliki tujuan yang akan dicapai, aturan kerja, norma yang ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, orang yang menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol, kerjasama, hubungan kemasyarakatan, dan penghargaan (Engkoswara 2010:142).

2. Organisasi Sebagai Suatu Sistem.

Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya terlihat dari pengertian dari organisasi itu sendiri yang memberi dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Dalam suatu sistem dikemukakan bahwa organisasi suatu kelompok elemen-elemen yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Jadi apabila salah satu elemen tidak dapat berjalan dengan baik maka akan mengganggu elemen yang lainnya sehingga kinerja organisasi juga akan terpengaruh. Organisasi sebagai suatu sistem dapat di gambarkan dalam diagram dibawah ini.

Organisasi Sebagai Suatu Sistem



Gambar 1. Diagram Organisasi sebagai suatu sistem.
(Sumber Engkoswara, 2010:143).

Suatu sistem memiliki tiga komponen atau elemen utama yaitu input, proses dan output. Ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain. Saling keterkaitan inilah yang dikatakan sebagai suatu sistem.

3. Organisasi Publik.

Samuelson dalam Raharjo (2011:41) mengatakan bahwa organisasi publik bermula dari konsep barang publik yaitu produk tertentu berupa barang

dan jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar yang dilakukan individu individu. Oleh karena barang dan jasa yang bersifat kolektif ini lah harus adanya upaya untuk mengelolanya secara kolektif pula. Dari pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian organisasi publik adalah organisasi yang mengelola barang dan jasa dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Perbedaan antara organisasi publik dengan organisasi bisnis secara umum dapat dibedakan dalam beberapa faktor diantaranya adalah ditinjau dari tujuan dari organisasi itu sendiri (antara mencari laba dan laba), dari segi produk yang dihasilkan (antara *publik goods* dan *privat goods*), cara pengambilan keputusan (antara proses demokrasi/birokratis dan proses strategi bisnis), dan ditinjau dari ukuran kinerja (antara *social welfare* dan efisiensi). Dari beberapa perbedaan antara diatas pengelolaan organisasi publik berhadapan dengan tantangan tugas dan komplektifitas yang rumit daripada pengelolaan organisasi bisnis. Baber dalam Raharjo (2011:45) mengambarkan bahwa suatu alasan mengapa organisasi publik tidak dapat dengan mudah mengubah orientasi sebagai mana organisasi bisnis yang sekaligus menjadi ciri ciri dari organisasi publik, yaitu. :

- a. Organisasi publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu
- b. Organisasi publik banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
- c. Organisasi publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
- d. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kompetensi yang ada.
- e. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
- f. Organiasasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikansi simbolis lebih besar.

- g. Organisasi publik memegang standart lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
- h. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
- i. Organisasi publik beroperasi untuk publik.
- j. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Unsur dalam administrasi, manajemen serta organisasi yang berfungsi untuk menjalankan dan mencapai tujuan yang ditetapkan adalah adanya unsur manusia. Agar pekerjaan yang dilakukan teratur dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka perlu adanya pengaturan unsur manusia itu sendiri. Pengaturan yang dimaksud adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau di dalam sektor publik di kenal dengan Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA).

D. Manajemen Sumber Daya Aparatur.

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Aset penting yang dimiliki oleh organisasi pemerintah dan harus diperhatikan adalah pegawai. Untuk mengaturnya diperlukan sebuah pengaturan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Wukir (2013:43) manajemen sumber daya manusia adalah metode untuk menyatukan dan memelihara para pegawai dalam organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dan memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Hasibuan (2012:10) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan pegawai agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Schuler dan Jackson dalam Wukir (2013:50) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Dari

beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menyatukan dan memelihara para pegawai secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi agar supaya hubungan serta peranan bisa berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen sumber daya manusia secara umum membicarakan mengenai bagaimana mengelola individu yang ada di dalam organisasi, dalam sektor publik pengelolaan pegawai atau aparatur pemerintah dikenal dengan manajemen sumber daya aparatur. Pengertian manajemen sumber daya aparatur menurut Hardjanto (2013:2) adalah suatu kegiatan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi aparatur sebagai aparat atau sebagai alat pemerintah mencapai tujuannya. Menurut Dessler dalam Masiah (2013:55) menyebutkan bahwa manajemen sumber daya aparatur adalah suatu proses penerimaan, pelatihan, penilaian, kepuasan kerja, memberikan layanan kesehatan dan keamanan. Menurut William dalam Masiah (2013:55) menyebutkan bahwa manajemen sumber daya aparatur bertujuan untuk meningkatkan kontribusi orang-orang yang ada dalam organisasi dengan strategi, etika dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sumber daya aparatur adalah keseluruhan proses mulai dari proses awal yaitu penerimaan, pelatihan hingga penilaian kerja yang bertujuan untuk meningkatkan peran sumber daya manusia yang ada didalamnya dengan strategi tertentu dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pemerintah.

Pengelolaan sumber daya aparatur menjadi unsur yang penting dari fungsi manajemen pemerintah. Jika sumber daya aparatur tidak dikelola secara baik maka efektifitasnya akan merosot lebih cepat daripada sumberdaya lainnya (Hadjanto, 2012:3). Pada era global dewasa ini aktifitas pengelolaan sumber daya aparatur secara efektif akan meningkatkan keberhasilan visi dan misi pemerintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemajuan dan perkembangan saat ini berlangsung dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis, dan kehidupan lainnya. Untuk meningkatkan efektifitas dari organisasi maka salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi aparatur pemerintah.

2. Kompetensi.

a. Definisi Kompetensi.

Definisi kompetensi menurut Jackson and Schuler dalam Azhkezari (2012:62) “*Competencies are defined as the skills, knowledge, abilities and other characteristics that someone needs to perform a job effectively*”. Kompetensi di definisikan sebagai seperangkat ketrampilan, pengetahuan, kemampuan dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut *Hong Kong IT Professional Certification* (2011:2) menyatakan bahwa “*Competency based practices describe how individuals within a specific professional competency apply their knowledge, perform their skills, and apply their process knowledge*”. Kompetensi berdasarkan praktek untuk menggambarkan bagaimana individu individu yang didalamnya terdapat kompetensi profesional yang spesifik menggunakan pengetahuan mereka,

menunjukkan keterampilan dan menggunakan proses pengetahuan mereka. Pengertian dari kompetensi lainnya dikutip dari www.sph.uth.edu (2012:1) menyatakan bahwa *“a competency is the capability to apply or use a set of related knowledge, skills, and abilities required to successfully perform “critical work functions” or tasks in a defined work setting”*. Suatu kompetensi adalah kemampuan untuk menggunakan seperangkat dari pengetahuan, keterampilan, dan kecapakan yang diperlukan untuk berhasil menunjukkan *“fungsi kerja kritis”* atau tugas dalam sebuah definisi pengaturan kerja. Timothy dan Mitchell dalam Saleh (2013:19) juga mendefinisikan *“a competency is a set of observable performance dimension, including individual knowledge, skill, attitude, behaviors, as well as collective team, process, and organizational capabilities that are linked to high performance and provide the organization with sustainable competitive advantage”*. Suatu kompetensi adalah seperangkat dimensi kinerja yang dapat diamati meliputi pengetahuan individu, keahlian, sikap dan perilaku sama baiknya dengan tim yang kolektif, proses dan kemampuan organisasi yang mana dihubungkan dengan kinerja tinggi dan menyediakan organisasi dengan keuntungan kompetitif dan berkelanjutan. Dari beberapa definisi kompetensi pada dasarnya adalah kemampuan yang dimiliki individu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu baik itu kemampuan dari aspek pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku.

b. Indikator Kompetensi.

Parry dalam Cooper (2000:18) menyebutkan beberapa indikator yang dalam kompetensi terdiri dari :

- a. *a cluster of related knowledge, attitude, and skills that affect a major part of one job.* Gabungan dari pengetahuan yang terkait, sikap, dan keterampilan yang mempengaruhi bagian utama dari satu pekerjaan.
- b. *“that correlates with performance on the job”.* Gabungan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut mempunyai kesesuaian dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. *“that can be measured against well accepted standard”.* Gabungan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat diukur melalui suatu standar yang baik.
- d. *“that can be improved via training and development”.* Gabungan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan.

Selain pengetahuan dan keahlian, masih terdapat beberapa indikator dalam penilaian kompetensi. Competency Based HRM Training dalam Saleh (2013:20) menyebutkan bahwa ada 5 (lima) aspek dalam kompetensi yang terdiri dari :

- a. *Communicate effectively to the public and professional colleagues.* Berkomunikasi dengan efektif kepada publik dan rekan sejawat yang profesional.
- b. *Work in a team in the delivery of services.* Bekerja dalam sebuah tim yang didalam mengirimkan sebuah layanan
- c. *Be aware of their roles as a scientist and expertise in the community.* menyadari peran mereka sebagai seorang ilmuwan dan ahli di dalam masyarakat.
- d. *Have a elementary knowledge of organization and management of practice.* Memiliki pengetahuan dasar serta praktek tentang organisasi dan manajemen
- e. *Demonstrate a capability to conduct themselves in a professional manner regarding their professions independently.* Menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri dalam etika professional berhubungan dengan pekerjaan mereka yang mandiri.

Dari lima aspek diatas dapat dilihat bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek dari kompetensi. Dengan komunikasi yang baik membantu individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pula.

3. Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai negeri sipil merupakan bagian sebuah organisasi Negara, menurut Undang – Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yaitu

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaannya dan ketaatan kepada pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang undangan dan di gaji menurut oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bila dihubungkan antara manajemen sumber daya aparatur dengan pegawai negeri sipil maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Berdasarkan jabatan karier yang ada dalam birokrasi pemerintahan tersebut, dalam penelitian ini di fokuskan pada profesi guru. Guru yang dimaksud adalah guru yang merupakan pegawai negeri sipil. Alasan pemilihan guru karena guru merupakan bagian dari pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional bergerak pada bidang pendidikan.

E. Profesi Guru (Tenaga Kependidikan).

1. Pengertian Guru.

Pengertian guru jika dipandang dari sisi etimologinya berasal dari bahasa india. Yang mana pengertian guru adalah seseorang yang memberi pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Dari segi bahasa Indonesia, pengertian guru secara umum dianggap sebagai seorang pendidik yang profesional dan memiliki tugas utamanya yaitu mengajar, mengarahkan, mendidik, membimbing, mengevaluasi, melatih, serta juga menilai siswa atau

peserta didik. Ditinjau dari aspek legal formal pengertian Guru menurut UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Secara umum pengertian guru diartikan sebagai orang yang bertugas menjadi fasilitator untuk para peserta didik dalam belajar dan juga dalam pengembangan kemampuan dan juga potensi dasar yang dimilikinya secara maksimal. Sekolah baik yang dibangun oleh pihak swasta atau masyarakat maupun yang dibangun oleh pemerintah.

2. Persyaratan Profesi Guru.

Dalam kajian administrasi publik, guru merupakan bagian dari pegawai negeri sipil yang bergerak dibidang pendidikan, namun profesi guru memiliki kekhususan dan memerlukan keahlian tertentu dalam melaksanakan tugasnya yang berbeda dari pegawai negeri sipil lainnya. Suatu pekerjaan dapat menjadi profesi harus memenuhi kriteria tertentu yang melekat dalam pribadinya sebagai tuntutan melaksanakan profesi tersebut, hal ini berlaku pada profesi guru sebagaimana yang dikatakann oleh Wirawan dalam Rachmawati (2013:5) persyaratan profesi guru antara lain:

a. Pekerjaan penuh.

Profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek atau bidang tertentu dalam anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah.

b. Ilmu Pengetahuan.

Salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah adanya teori. Dengan adanya teori ilmu pengetahuan, profesi dapat menjelaskan apa yang dihadapinya dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan

intervensi. Teori juga mengarahkan suatu profesi dalam pengambilan langkah langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesi.

c. Aplikasi ilmu pengetahuan.

Aspek aplikasi ilmu pengetahuan merupakan penerapan teori – teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau memecahkan suatu masalah. Kaitannya dengan profesi, guru tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai tetapi juga pola penerapan ilmu pengetahuan tersebut sehingga guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengajar.

d. Lembaga Pendidikan Profesi.

Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu keguruan.

e. Perilaku professional.

Perilaku professional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh seseorang secara professional ketika melakukan profesinya. Menurut Bernard Barber dalam Rachmawati (2013:6) perilaku professional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Mengacu pada ilmu pengetahuan.
- b) Berorientasi kepada interest masyarakat bukan interest pribadi.
- c) Pengendalian perilaku diri sendiri dengan mempergunakan kode etik.
- d) Imbalan dan kompensasi uang atau kehormatan merupakan symbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.
- e) Salah satu aspek dari perilaku adalah otonomi atau kemandirian dalam pelaksanaan profesinya.

f. Standar Profesi.

Standar profesi adalah prosedur prosedur dan norma norma serta prinsip prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran (output) kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi (Rachmawati, 2013:7). Standar dan prosedur penilaian yang dikembangkan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar Guru bertanggung jawab terhadap siswa dan belajarnya.

- a) Guru mengetahui materi ajar yang mereka ajarkan dan bagaimana mengajar materi kepada siswa.
- b) Guru bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor belajar siswa.
- c) Guru berfikir secara sistematis tentang apa yang mereka kerjakan dan pelajari dari pengalaman.
- d) Guru adalah anggota dari masyarakat belajar.

g. Kode Etik Profesi.

Suatu profesi dilaksanakan oleh professional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma norma etika profesi. Kode etik guru merupakan suatu norma yang mengatur tingkah laku guru dan oleh karena itu haruslah ditaati oleh guru dengan tujuan antara lain :

- a) Agar guru mempunyai rambu rambu yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sebagai pendidik.
- b) Agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik.
- c) Agar guru dapat menjaga jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai pendidik.
- d) Agar guru secepatnya dapat kembali, jika ternyata apa yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan norma norma yang ada dalam kode etik guru, atau dengan kata lain sebagai bahan introspeksi diri.

3. Tugas Guru.

Dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik, guru memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda latar belakang baik dari segi budaya maupun dari segi status sosial peranan guru sulit untuk digantikan bahkan di era yang kemajuan teknologinya begitu pesat. Dengan adanya guru yang professional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun bersaing di dunia kerja. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk membimbing, mendorong, dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru memegang tanggung jawab penuh mengenai proses perkembangan peserta didik yang ada di dalam kelas. Secara rinci tugas guru berpusat pada :

- a. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.
- b. Membantu perkembangan aspek aspek pribadi seperti sikap, nilai nilai, dan penyesuaian diri.
- c. Mendidik dengan menitik beratkan kepada motivasi dan pemberian arah pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru.

Dalam pelaksanaan pendidikan, guru memegang peranan penting dalam keberhasilannya. Guru dianggap sebagai orang yang berperan dalam pencapaian pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari faktor internal maupun faktor eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain :

- a. **Kepribadian dan dedikasi.**

Kepribadian merupakan keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang tersebut.

- b. **Pengembangan Profesi.**

Pengembangan profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta penerapan strateginya.

- c. **Kemampuan Mengajar.**

kemampuan yang berkaitan dengan keluasan dan kedalaman pengetahuan kompetensi dimaksud meliputi pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi, pengembangan potensi peserta didik dan penguasaan akademik.

d. Antar Hubungan dan Komunikasi.

Selain dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi juga penting dalam kegiatan organisasi karena dengan komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Komunikasi yang efektif menjadi penting bagi semua organisasi.

e. Hubungan dengan Masyarakat.

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan bentuk hubungan komunikasi ekstern yang dilaksanakan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan tujuan. Masyarakat merupakan kelompok individu yang berusaha menyelenggarakan pendidikan atau membantu usaha pendidikan. Dalam masyarakat juga terdapat individu-individu yang bersimpati terhadap pendidikan di sekolah.

f. Kedisiplinan.

Kedisiplinan seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan disiplin lain akan memberikan tauladan bagi siswa bahwa disiplin sangat penting bagi siapapun apabila ingin sukses. Perilaku disiplin dalam kaitannya dengan kinerja guru sangat erat hubungannya karena hanya dengan disiplin yang tinggi pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

g. Kesejahteraan.

Profesionalitas guru tidak hanya dilihat dari kemampuan guru dalam mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, tetapi juga dilihat oleh pemerintah dengan cara memberikan gaji yang pantas serta layak.

h. Iklim Kerja.

Iklim sekolah memegang peranan penting sebab iklim kerja itu menunjukkan suasana kehidupan pergaulan dan pergaulan di sekolah itu. Iklim kerja menggambarkan kebudayaan, tradisi, dan cara bertindak secara individu yang ada di sekolah, khususnya kalangan guru.

5. Indikator Kompetensi Guru.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki setiap guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Kompetensi guru sebagaimana dijelaskan menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kompetensi guru terdiri dari

a. **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda.

b. **Kompetensi Kepribadian**

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat

c. **Kompetensi Sosial**

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. (Badan PSDMPK-PMP, 2012 : 27-30)

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang administrasi publik maka penggunaan alat ukur atau indikator dalam penelitian ini perlu adanya penyesuaian dengan kajian administrasi publik. Indikator dalam menilai kompetensi guru menggunakan indikator latar belakang pendidikan, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, pengalaman organisasi, sertifikasi guru dan komunikasi., adapun penjelasan indikator kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang pendidikan.

Pengetahuan guru diukur melalui tingkat pendidikan yang dimiliki serta kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas yang sedang dijalankannya. Karena dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dapat mendorong peningkatan kinerja baik untuk individu tersebut maupun kinerja organisasi.

b. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain latar belakang pendidikan seorang guru harus mengerti dan menguasai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang setiap harinya. Ilmu pengetahuan merupakan dasar untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik, sedangkan teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai sarana untuk mendukung kewajiban dan tugasnya sebagai pendidik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuntun sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan. Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya mempersiapkan atau membekali sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa.

c. Pengalaman Organisasi.

Kompetensi ditinjau dari aspek pengalaman organisasi merupakan tinjauan individu dalam mengikuti organisasi dan menjalankan semua aktifitas yang ada didalamnya. Pengalaman organisasi dinilai dari seberapa lama masa kerja, jabatan yang pernah dijalani, perannya dalam organisasi.

d. Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu komponen utama dalam organisasi yang berfungsi menyampaikan pesan. Dalam berkomunikasi

tentu menggunakan cara yang baik dan benar. Komunikasi yang digunakan oleh seorang pendidik berkaitan dengan cara berkomunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan teman sejawat, komunikasi dengan pemimpin, serta berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.

b. Sertifikasi.

Sertifikasi merupakan salah satu syarat selain latar belakang pendidikan yang harus dimiliki guru. Dengan pendidik yang sudah disertifikasi diharapkan kinerja yang dilakukan bisa meningkat. Sertifikasi merupakan bukti seorang guru yang sudah kompeten dalam bidangnya. Sebagai bahan evaluasi guru pasca sertifikasi dan untuk melihat naik turunnya kinerja pendidik maka secara berkala pemerintah melaksanakan program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru sebagai yang telah disebutkan pada point 4 (empat), salah satu faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kedisiplinan.

F. Disiplin.

1. Pengertian Disiplin.

Menurut Kerlinger dan Pahazur (Gusti, 2012:4), mengemukakan bahwa disiplin yang baik terdapat apabila seseorang datang ke tempat dengan teratur dan tepat waktu, berpenampilan dan berpakaian sebagaimana mestinya, menggunakan

sarana dan prasana sebagaimana mestinya, serta mampu melaksanakan pekerjaan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan waktu yang tersedia. Davis dan Newstrom dalam Utama (2010 : 14-15) menjelaskan “*discipline is management action to enforce organization standards*”. Disiplin merupakan suatu tindakan manajerial untuk menegakkan standar organisasi. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005:291) mendefinisikan disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Robert E. Quinn Cs dalam Prawirosentono (1999 : 32) mengatakan : “*Discipline implies obedience and respect for the agreement between the firm and its employee. Discipline also involves sanction judiciously applied*”. Disiplin merupakan ketaatan dan menghormati kesepakatan antara organisasi dan pegawai yang ada didalamnya. Disiplin juga melibatkan penerapan sanksi yang bijaksana. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesedian seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma norma sosial yang berlaku, serta kesadaran dan kesedian dalam melaksanakan tugas yang berikan dengan penuh tanggung jawab.

2. Model Disiplin.

Dalam penerapannya, disiplin dapat dibagi kedalam tiga model yang berbeda, diantaranya :

- a. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Dalam konteks guru dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakal menurut terhadap perintah dan anjuran pejabat yang berwenang tanpa menyumbangkan gagasan dan pemikirannya.
- b. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Dalam konteks guru harus diberikan kebebasan seluas luasnya didalam kelas dan sekolah. Aturan disekolah tidak perlu mengikat kepada guru.
- c. Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali, yaitu memberikan kebebasan kepada guru untuk berbuat, tetapi konsekwensi dari perbuatan itu haruslah dipertanggung jawabkan.

3. Indikator Kedisiplinan.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas diantaranya adalah :

a. Tingkat kehadiran.

Tingkat kehadiran diukur dari tingkat prosentase kehadiran pada saat jam kerja. Dalam menentukan tingkat kehadiran ini dibantu oleh teknologi absensi sidik jari (*Finger Print*)

b. Tepat waktu.

Ketepatan waktu tidak hanya diukur dari ketepatan waktu ketika datang ke tempat kerja. Ketepatan waktu ini juga mengarah kepada

waktu pulang kerja dan kesesuaian antara jam kerja dengan pemanfaatan waktu untuk bekerja.

c. Pelaksanaan tata tertib.

Pelaksanaan tata tertib ini berkaitan dengan penerapan tata tertib yang berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, sehingga penerapan peraturan ini berjalan sebagaimana mestinya.

d. Komitmen terhadap tugas.

Disiplin selain berkaitan dengan kehadiran dan pelaksanaan peraturan, kedisiplinan juga berkaitan dengan masalah pelaksanaan dari tugas serta tanggung jawab dari tugas tersebut.

G. Pendidikan.

1. Pengertian Pendidikan.

Pengertian pendidikan menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Langeveled dalam Engkoswara (2010:5-6) menyatakan bahwa pengertian pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar

anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain, dengan kata lain membimbing anak mencapai kedewasaan.

2. Standar Pendidikan.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan di atur dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Untuk mewujudkan bangsa yang cerdas sebagaimana yang telah diamatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar Nasional Pendidikan inilah yang menjadi indikator kualitas pendidikan di suatu sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Berikut ini penjelasan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia:

a. Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

b. Standar Isi.

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

c. Standar Proses.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.

e. Standar Sarana dan Prasarana.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan Pendidikan.

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

g. Standar Pembiayaan Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Kualitas Layanan Pendidikan.

Pendidikan merupakan bagian dari layanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam kelompok pelayanan jasa sebagaimana yang terdapat dalam

Kepmenpan no 63 tahun 2003. Kualitas pendidikan maupun kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Ditinjau dari aspek etimologis kata kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, baik buruknya barang. Dari pengertian kualitas tersebut maka dapat diketahui bahwa pengertian kualitas pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai mutu dari pendidikan atau menilai baik atau buruknya suatu proses pendidikan. Pada hakikatnya kualitas merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh setiap sekolah, baik dari sisi masukan, proses maupun sisi keluaran yang terukur secara objektif dan berdasarkan penilaian subjektif (Suyatno, 2006 : 2). Ahmad dalam Undariyati (2013:4) menyatakan bahwa kualitas pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma dan standar yang berlaku. Menurut Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar (1993:159) mendefinisikan kualitas pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Penilaian kualitas pendidikan dapat dinilai dari proses pendidikan maupun hasil pendidikan. Dalam penelitian ini penilaian kualitas pendidikan dilihat dari aspek hasil. Hasil atau *output* dari pendidikan mengacu pada prestasi yang telah dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai berupa hasil kemampuan secara akademik maupun dibidang non akademik. Selain itu kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari hasil lulusan yang memiliki bekal yang cukup

untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun terjun ke dunia kerja. Dari beberapa pernyataan di atas maka dalam penelitian ini indikator yang digunakan dalam menilai kualitas pendidikan adalah:

a. Prestasi Sekolah

Prestasi sekolah yang dimaksud adalah nilai rata-rata mata pelajaran, prestasi olimpiade mata pelajaran, prestasi Olahraga dan non akademik, prestasi karya tulis ilmiah.

b. Hasil Lulusan.

Menilai kualitas pendidikan dari aspek output atau hasil lulusan dapat diukur dari nilai rata-rata ujian nasional, ranking hasil rata-rata ujian nasional tingkat kabupaten, jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, jumlah lulusan yang langsung bekerja dan jumlah pengangguran / menunggu bekerja setelah lulus SMA.

H. Hubungan Antara Kompetensi dan Kedisiplinan Guru Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Sekolah.

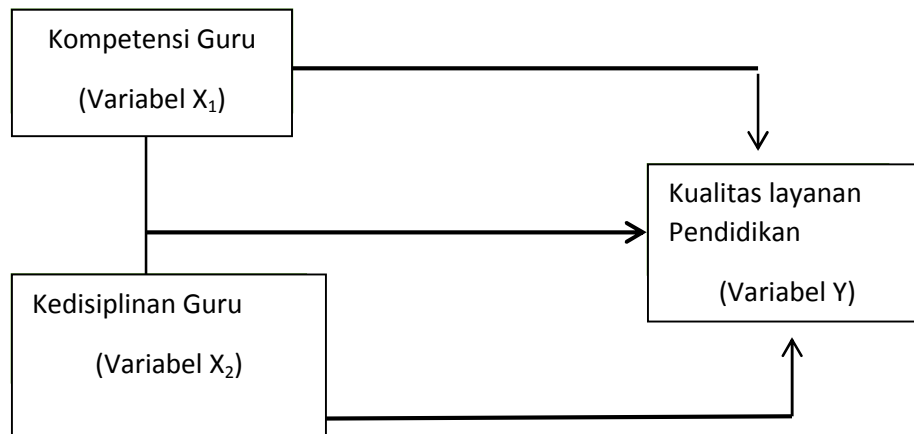
Dalam sebuah organisasi sekolah, kualitas layanan pendidikan dari suatu sekolah dapat ditentukan oleh bagaimana hasil lulusan dari sekolah tersebut maupun prestasi yang diraih oleh siswa. Guru yang merupakan bagian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari standar nasional pendidikan Indonesia memiliki peran yang penting dalam menciptakan hasil lulusan maupun prestasi yang diraih siswa, karena guru merupakan salah satu tempat dimana siswa mendapatkan ilmu pengetahuan,

tempat untuk bertanya, dan tempat siswa untuk berbagi tentang kesulitan yang mereka miliki. Mengingat posisi guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang penting dalam menentukan kualitas pendidikan sekolah, maka kualitas dari guru juga menjadi perhatian. Kualitas dari guru dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari segi kompetensi yang dimiliki dan tingkat kedisiplinan.

Kompetensi guru merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dimana kemampuan ini yang membedakannya dengan profesi yang lain, sedangkan kedisiplinan guru merupakan sikap dari seorang guru untuk menaati dan melaksanakan peraturan yang ada baik peraturan yang ada di sekolah maupun peraturan lainnya. Hubungan antara kompetensi dan kedisiplinan guru dengan kualitas layanan pendidikan dapat dilihat secara parsial maupun secara simultan. Secara parsial, dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki guru, maka akan meningkat pula kualitas layanan pendidikan yang dimiliki oleh sebuah sekolah begitu pula sebaliknya, dan meningkatnya kedisiplinan yang dimiliki guru maka semakin meningkat pula kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan Secara Simultan, dengan meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan guru secara bersama-sama maka akan meningkat pula kualitas layanan pendidikan yang dimiliki oleh suatu sekolah dan begitu juga sebaliknya.

I. Hipotesis Penelitian.

Menurut Arikunto (2010) hipotesis didefinisikan sebagai *alternative* dugaan jawaban yang dibuat oleh penelitian bagi problematika yang diajukan dalam penelitian. Sugiyono (2012) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukan itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran. Berdasarkan tujuan dan judul penelitian ini maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :



Gambar 2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1, “Diduga ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap kualitas layanan pendidikan.”

- a. H_a : adanya pengaruh antara kompetensi guru terhadap kualitas layanan pendidikan.
- b. H_0 : tidak ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap kualitas layanan pendidikan.

Hipotesis 2 “Diduga ada pengaruh antara kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.”

- a. H_a : adanya pengaruh antara kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.
- b. H_0 : tidak ada pengaruh antara kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.

Hipotesis 3.

“Diduga adanya pengaruh secara bersama sama antara kompetensi guru dan kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan”

- a. H_a : adanya pengaruh secara bersama sama antara kompetensi guru dan kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.
- b. H_0 : tidak ada pengaruh secara bersama sama antara kompetensi guru dan kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian bagian dan fenomena serta hubungan hubungannya. Sugiyono (2008:13) menjelaskan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Singarimbun (2006:5) menjelaskan bahwa apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel variabel melalui pengujian hipotesa, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian ini nantinya akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel kompetensi dan kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah.

B. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti akan melakukan penelitian. Dari lokasi penelitian inilah peneliti akan mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti. Mengingat luasnya obyek yang akan diteliti maka diambil sebuah studi kasus. Pengertian studi kasus menurut Ary, Jacobs, dan Razavieh dalam Ardhana (2008) adalah peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Dengan studi kasus ini maka adanya pemusatan dan pembatasan dalam penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah SMA 1 Cepu dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 55 Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena SMA 1 Cepu merupakan SMA yang berstatus sebagai sekolah Kecamatan yang mampu memiliki prestasi yang cukup bagus mulai dari tingkat kabupaten hingga ke provinsi bahkan sempat mengikuti lomba tingkat nasional baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Selain itu lokasi sekolah yang berada pada perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini mempunyai daya tarik bagi siswa dari luar Kabupaten Blora terutama dari wilayah Jawa Timur yang di dominasi dari Kabupaten Bojonegoro yang berasal dari Kecamatan Kasiman Kecamatan Padangan, dan Kecamatan Kalitidu.

C. Variabel dan Pengukuran.

Sebuah penelitian memerlukan adanya pemahaman tentang konsep dari permasalahan yang hendak di teliti, karena melalui konsep yang akan dapat dirumuskan hubungan-hubungan teoritis. Dari judul “Pengaruh Kompetensi dan Kedisiplinan Guru Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (Studi Pada SMA 1 Cepu Kabupaten Blora)” dapat diketahui ada tiga konsep yang terkandung dalam judul tersebut yaitu :

- a. Kompetensi Guru (X1)
- b. Kedisiplinan Guru (X2)
- c. Kualitas Layanan Pendidikan (Y)

Variabel penelitian pada dasarnya adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan objek yang telah ditetapkan peneliti untuk di kaji lebih lanjut sehingga informasi mengenai objek tersebut dapat di peroleh dan dapat ditarik kesimpulannya.

Tabel 2 Definisi Konseptual

No.	Variabel	Konsep Variabel
1	Kompetensi Guru (Variabel X ₁)	Kompetensi guru merupakan karakteristik yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan keahlian, ilmu pengetahuan, sifat dan cara berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang guru yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik.
2	Kedisiplinan Guru (Variabel X ₂)	Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma norma sosial yang berlaku, serta kesadaran dan kesediaan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
3	Kualitas Layanan Pendidikan (Variabel Y)	Kualitas layanan pendidikan adalah hasil dari pelaksanaan proses pendidikan di suatu lembaga sekolah, dimana kualitas pendidikan ini diukur dari keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah tersebut baik dari prestasi sekolah maupun hasil dari lulusan.

Tabel 3 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Item
1.	Kompetensi Guru (Variabel X ₁)	X.1.1 Latar Belakang Pendidikan	Pendidikan minimal yang harus dimiliki seorang pendidik.
			Kesesuaian antara kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki dengan pekerjaan Penataran / diklat yang pernah di ikuti
			Penelitian Tindakan Kelas yang pernah dilakukan
		X.1.2 Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi	Penguasaan aspek teori dan praktek mengajar
			Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (menggunakan laptop, proyektor, bahan ajar yang kreatif)
			Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari informasi dan bahan yang akan diajarkan.
		X.1.3 Pengalaman Organisasi	Kinerja guru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
			Posisi yang pernah diduduki dalam sebuah organisasi.
		X.1.4 Komunikasi	Tingkatan organisasi tertinggi yang pernah di ikuti.
			Komunikasi kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar
			Komunikasi dengan lingkungan sekolah baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah

No	Variabel	Indikator	Item
		X.1.5 Sertifikasi	Sertifikasi merupakan bukti tingkat kompetensi guru dibidangnya
			Kinerja Guru yang sudah disertifikasi
			PLPG sebagai bahan evaluasi dan kelayakan penerima sertifikasi
2.	Kedisiplinan Guru (Variabel X ₂)	X.2.1 Tingkat Kehadiran	Selalu datang bekerja jika tidak ada halangan atau dalam keadaan sakit
			Manfaat penerapan absensi sidik jari.
		X.2.2 Tepat Waktu	Tepat waktu datang dan pulang kerja
			Tepat waktu saat mengajar
			Pemanfaatan waktu luang untuk mencari bahan ajar.
		X.2.3 Pelaksanaan Tata Tertib	Tata tertib dilaksanakan oleh semua unsur yang ada disekolah
			Penggunaan seragam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
			Mengikuti upacara setiap hari senin dan hari besar lainnya.
			Menggunakan tanda pengenal
			Kepala sekolah menciptakan kebiasaan yang mampu mendorong terciptanya sikap disiplin
Siap menerima sanksi jika melanggar peraturan			

No	Variabel	Indikator	Item
			Sanksi/hukuman yang diberikan tegas namun bersifat mendidik.
		X.2.4 Komitmen terhadap Tugas	Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas
			Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
			Selalu siap saat diberikan tugas diberikan oleh pimpinan.
3.	Kualitas Layanan pendidikan (Variabel Y)	Y.1.1 Prestasi Sekolah	Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran.
			Nilai Rata Rata Mata Pelajaran
			Prestasi Lomba Mata Pelajaran
			Prestasi Olahraga dan bidang non akademik lainnya
			Prestasi karya ilmiah
		Y.1.2 Hasil Lulusan	Prosentase tingkat kelulusan
			Rangking nilai Ujian Nasional tingkat Kabupaten
			Jumlah lulusan yang melanjutkan di Perguruan Tinggi
			Jumlah lulusan yang langsung bekerja
			Jumlah lulusan yang menganggur

Menurut Sugiyono (2008:92) skala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan menggunakan instrument tertentu dapat digunakan dalam bentuk angka sehingga lebih akurat.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2008:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dengan menggunakan skala liker maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Cara pengukuran skala likert adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan pernyataan dan kemudian diminta untuk member satu jawaban yang terdiri dari 5 alternatif jawaban yang mengandung variasi nilai bertingkat dari objek penelitian melalui tanggapan pernyataan yang diberi nilai 1 sampai dengan 5 pada lembar kuesioner. Sistem skor yang digunakan untuk menilai variabel Kompetensi Guru dan Kedisiplinan Guru adalah sebagai berikut :

- a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju diberi skor 4

- c. Jawaban Cukup Setuju diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

Kriteria penilaian untuk Jawaban

Sangat Setuju	: sangat setuju dengan asumsi penilaian sangat baik
Setuju	: setuju dengan asumsi penilaian baik
Cukup Setuju	: cukup setuju dengan asumsi penilaian cukup baik
Tidak Setuju	: tidak setuju dengan asumsi penilaian kurang baik
Sangat Tidak Setuju	: sangat tidak setuju dengan asumsi penilaian sangat kurang baik.

D. Pupulasi dan Sampel.

Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel secara acak harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan ciri ciri populasi dan tujuan penelitian. Menurut singarimbun dan effendi (2006:149), dengan meneliti sebagian populasi diharapkan hasil yang diperoleh akan menggambarkan sifat populasi yang diwakili. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa populasi dalam penelitian meliputi segala sesuatu yang akan dijadikan subyek atau obyek penelitian yang dikehendaki peneliti. Berkenaan dengan penelitian ini, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Guru SMA 1 Cepu yang yang berjumlah 54 orang. Mengingat populasi penelitian ini kurang

dari 100 yaitu hanya 54 orang, dan penelitian ini juga termasuk penelitian populasi atau sensus, maka semuanya diambil sebagai subyek penelitian.

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan populasi. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sensus, maka tidak diperlukan adanya sampel.

E. Teknik pengumpulan data.

1. Sumber data primer.

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber data kepada peneliti. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Kuesioner.

Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada para responden dalam populasi. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Setiap kuesioner memuat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan alternative jawaban berskala 5.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan sebagai subyek penelitian (Arikunto, 2010:198). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data

secara maksimal. Fungsi dari wawancara ini adalah mengkonfirmasi mengenai data yang didapat serta untuk menanyakan mengenai kuesioner yang belum diisi dengan lengkap.

2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen yang berasal dari instansi tempat melakukan penelitian. Data diperoleh dengan cara dokumentasi.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas.

Sebelum data yang diperoleh dianalisis, uji validitas dan reliabilitas merupakan tahap dimana data tersebut diuji terhadap instrument penelitian agar dapat diperoleh data yang benar benar valid dan reliable. Instrument penelitian memenuhi kriteria valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang hendak diukur dan instrument dapat digunakan beberapa kali pada objek yang sama, dan dapat menghasilkan data yang sama.

1. Uji validitas.

Validitas merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat intrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Arikunto, 2010:219). Uji keabsahan ini dilakukan untuk menguji apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsinya. Pada uji keabsahan yang dituju adalah kesahihan konstruksi dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing masing item dengan skor totalnya. Untuk mengetahui validitasnya, instrumen disebar kepada responden selanjutnya ditentukan validitasnya

dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

R_{xy}: koefisien korelasi antara x dan y

X : jumlah skor dari masing-masing (faktor yang mempengaruhi)

Y : jumlah skor dari seluruh (skor total)

N : banyaknya variabel sample yang dianalisis

(Sumber: Sugiyono, 2012: 182)

Dimana bila nilai r hitung > r tabel, maka angket valid, dan sebaliknya bila nilai r hitung < r tabel, maka angket tidak valid.

2. Uji reliabilitas.

Menurut Arikunto (2010:221) instrument yang reliable adalah suatu instrument yang dapat di percaya atau digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini adalah koefisien Alfa Cronbach.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum a}{a} \right]$$

Keterangan:

r_{11} : reliabilitas instrumen/koefisien alfa

k : banyaknya butir soal

a : total variasi

a : nilai variasi tiap-tiap butir

G. Teknik analisis data.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis, data yang sudah diperoleh dapat diberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif.

Analisis ini untuk mendeskripsikan karakteristik lokasi penelitian responden yang diikuti distribusi frekuensi variabel. Data yang diperoleh selanjutnya di olah dalam table dan dijelaskan secara deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. Hasil analisis ini juga dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat analisis uji hipotesis.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Untuk menentukan bentuk hubungan (regresi) diperlukan pemisahan yang tegas antara

variabel bebas yang sering diberi simbol X dan variabel tak bebas dengan simbol Y. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel yang menentukan atau dengan kata lain adanya ketergantungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dan sebaliknya. Kedua variabel biasanya bersifat kausal atau mempunyai hubungan sebab akibat yaitu saling berpengaruh. Sehingga dengan demikian, regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X atau dapat dinyatakan bahwa regresi adalah sebagai suatu fungsi $Y = f(X)$. Dalam Penelitian ini regresi linier yang digunakan adalah bentuk hubungan di mana variabel bebas X maupun variabel tergantung Y sebagai faktor yang berpangkat satu, dimana rumus yang digunakan adalah Regresi linier berganda dengan bentuk fungsi:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + \dots + b_pX_p + e$$

3. Nilai R² (koefisien determinasi)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel variabel dependen. Jika nilai R² sama dengan satu maka

pendekatan tersebut terdapat kecocokan sempurna dan jika R^2 sama dengan nol maka tidak ada kecocokan pendekatan

4. Uji t – Statistik.

Uji t-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, maka dilakukan pengujian keberartian masing-masing koefisien masing-masing regresi dengan menggunakan uji t – statistik sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : nilai uji t

r : nilai korelasi

n : besarnya sampel

(Sumber: Sugiyono, 2012: 214)

Untuk mengetahui hasil hipotesis apakah H_0 diterima atau ditolak, maka perlu dibandingkan antara t hitung dengan t tabel. Hasil pengujian t-statistik menggunakan program SPSS 19. Apabila hasil penghitungannya dari:

- Jika $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- Jika $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

5. Uji F-statistik.

uji F - statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$F_h = \frac{R/k}{(1-R)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi

n : jumlah anggota sampel

k : jumlah variabel independen

(Sumber: Sugiyono, 2012:192)

Pengujian hipotesis melalui uji F statistik ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas pembilang DF1= (k-1) dan derajat bebas penyebut DF2= (n-k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linear dan n merupakan jumlah pengamatan. Dasar pengambilan keputusan yaitu:

a. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterimadan H_a ditolak.

Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Jika probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya jika probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Kondisi Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Kecamatan Cepu terletak di posisi paling timur dari Kabupaten Blora yang merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, dimana kecamatan cepu ini mempunyai ketinggian 28 m dari permukaan laut.

Kecamatan Cepu merupakan salah satu kecamatan yang paling ramai selain ibukota Kabupaten Blora yaitu Kecamatan Blora karena di kecamatan ini berupa pusat ekonomi dan pusat keramaian.

"Penduduk Cepu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sedangkan sisanya sebagai wiraswasta, Pegawai Negeri, karyawan BUMN, dan peserta Pusklat Migas yang datang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan perekonomian Cepu lebih maju dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah daerah tingkat II Blora, dan untuk menunjang perekonomian di Cepu telah beroperasi beberapa bank yaitu : BRI, DANAMON, BNI, BANK MANDIRI, BPD dan lain-lain. Kegiatan perekonomian Cepu juga tidak lepas dari pengaruh instansi atau perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan ciri dari kota Cepu sebagai kota minyak. Contoh instansi dan perusahaan tersebut adalah PUSDIKLAT MIGAS, PERTAMINA UEP III Lap Cepu, PERTAMINA UPPDN IV Depot Cepu, Mobile Cepu Limited, TELKOM, PERHUTANI, dan masih banyak lagi termasuk industri kecil lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain-lain, karena sebelum adanya instansi atau perusahaan minyak dan gas bumi pengusaha kayu jati lebih dahulu berkembang di daerah Cepu." (Ceputelecenter.wordpress.com, 2010)

Kecamatan Cepu juga merupakan salah satu akses jalan kereta api lintas utara yang menghubungkan jalur Surabaya-Semarang-Jakarta. Selain jalur kereta api, Kecamatan Cepu Juga dilewati jalan yang menghubungkan Surabaya -

Purwodadi - Semarang. jadi tidak salah jika Kecamatan Cepu memiliki peran yang sangat penting bagi Kabupaten Blora .

Secara geografis luas daerah Kecamatan Cepu 49,145 km² yang terbagi atas 6 Kelurahan, 11 Desa, 84 RW dan 409 RT. Adapun Kelurahan dan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Cepu tersebut adalah :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Balun | 10. Mernung |
| 2. Cabean | 11. Mulyorejo |
| 3. Cepu | 12. Ngelo |
| 4. Gadon | 13. Nglanjuk |
| 5. Getas | 14. Ngloram |
| 6. Jipang | 15. Ngroto |
| 7. Kapuan | 16. Sumberpitu |
| 8. Karangboyo | 17. Tambakromo |
| 9. Kentong | |

Batas Wilayah Kecamatan Cepu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambong, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedungtuban dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Jika ditinjau dari luas wilayah Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora merupakan 2 wilayah yang memiliki luas wilayah yang cukup kecil dibanding kecamatan lainnya, namun disisi lain 2 Kecamatan ini merupakan wilayah yang paling

ramai dan paling banyak penduduknya. Hal ini didapat dilihat dari data BPS

Blora tahun 2012 dibawah ini :

Tabel 4. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Kabupaten Blora Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan
01. Jati	183,621	46.086	251
02. Randublatung	211,131	75.458	357
03. Kradenan	109,508	39.500	361
04. Kedungtuban	106,858	55.311	518
05. Cepu	49,145	73.598	1.498
06. Sambong	88,750	25.435	287
07. Jiken	168,167	38.121	227
08. Bogorejo	49,805	24.022	482
09. Jepon	107,724	60.127	558
10. Blora	79,786	92.540	1.160
11. Banjarejo	103,522	58.055	561
12. Tunjungan	101,815	45.732	449
13. Japah	103,052	33.992	330
14. Ngawen	100,982	57.076	565
15. Kunduran	127,983	63.218	494
16. Todanan	128,739	58.161	452
Jumlah	1.820,588	846.432	465

Sumber Data : BPS Kab. Blora

Secara keseluruhan Kabupaten Blora memiliki Luas Wilayah 1820,588 km² dengan jumlah penduduk jumlah penduduk 846.432 jiwa. Jumlah penduduk tersebut jumlah yang paling besar ada di Kecamatan Blora dengan 92.540 jiwa atau sekitar 10,93% , Kecamatan Randublatung 75.458 jiwa atau sekitar 8,91% dan di kecamatan cepu 73.598 jiwa atau sekitar 8,69%. Namun jika ditinjau dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Cepu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan 1498 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Blora

memiliki kepadatan penduduk 1160 jiwa/km². Jadi dapat disimpulkan bahwa keramaian atau kepadatan penduduk berpusat pada 2 wilayah yaitu di Kecamatan Cepu dan di Kecamatan Blora.

Dari aspek ketersediaan sarana pendidikan termasuk sekolah pada tingkat lanjutan atas Kabupaten Blora memiliki beberapa sekolah. Untuk lebih lengkap mengenai data sekolah, jumlah siswa, dan jumlah guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Data Sekolah, Murid dan Guru Tingkat SMA/Sederajat di Kabupaten Blora Tahun 2012

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
01. Jati	3	454	66
02. Randublatung	9	2.873	170
03. Kradenan	2	203	29
04. Kedungtuban	5	1.339	102
05. Cepu	15	5.840	446
06. Sambong	1	45	17
07. Jiken	3	241	49
08. Bogorejo	0	0	0
09. Jepon	1	612	35
10. Blora	11	6.712	413
11. Banjarejo	3	297	25
12. Tunjungan	7	3.870	314
13. Japah	0	0	0
14. Ngawen	5	1.107	80
15. Kunduran	3	601	40
16. Todanan	3	966	74
Jumlah	71	25.160	1.860

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora dalam BPS Blora tahun 2012

Secara keseluruhan jumlah sekolah tingkat SMA/Sederajat di Kabupaten Blora sejumlah 71 sekolah dengan jumlah murid 25.160 siswa dan jumlah guru 1860 guru. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah terbanyak terdapat di Kecamatan Cepu dengan 15 Sekolah atau sekitar 21,12% dan Kecamatan Blora dengan 11 sekolah atau sekitar 15,49%. Dari jumlah siswa jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Blora yaitu dengan 6.712 siswa atau sekitar 26,68% dan kecamatan cepu 5.840 siswa atau sekitar 23,21%. Dari jumlah guru jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Cepu dengan 446 guru atau sekitar 23,98% dan di Kecamatan Blora 413 guru atau sekitar 22,60%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang ada di Kabupaten Blora juga berpusat pada 2 Wilayah yaitu di Kecamatan Blora mengingat posisinya sebagai Ibukota Kabupaten dan di Kecamatan Cepu yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. Dari beberapa sekolah di Kecamatan Cepu yang menjadi perhatian karena kualitas maupun prestasinya cukup baik adalah SMA Negeri 1 Cepu.

2. Sejarah Singkat SMA Negeri 1 Cepu

Berdirinya SMA Negeri 1 Cepu yang dicetuskan oleh para tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di Cepu pada tanggal 1 Agustus 1966, pada dasarnya merupakan suatu tekad yang didorong untuk ikut mencerdaskan kehidupan Bangsa ditengah-tengah kehidupan Bangsa lain. Cita-cita yang melahirkan SMA Negeri 1 Cepu ini, merupakan keyakinan yang dalam yang tumbuh dari kondisi nyata masyarakat Cepu sepanjang proses identifikasinya sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, yang menggerakkan tekad para tokoh

masyarakat dan pejabat pemerintahan di Cepu untuk mendirikan SMA Negeri yang berlokasi di Cepu. Kota Cepu merupakan sebuah daerah eks. Kawedanan di daerah Kabupaten Blora yang sangat padat penduduknya, bila dibandingkan dengan daerah eks. Kawedanan yang lain. Disamping itu, Cepu mempunyai kelebihan dan beberapa pertimbangan dalam rangka memperkuat keberadaan sebuah SMA Negeri di Cepu pada saat itu.

Daerah Kabupaten Blora pada saat itu terdiri dari 4 eks Kawedanan, yaitu eks Kawedanan Blora, eks Kawedanan Cepu, eks Kawedanan Randublantung dan eks Kawedanan Ngawen dengan 14 kecamatan (sekarang 16 kecamatan) dengan jumlah penduduk pada tahun 1966 lebih-kurang 700.000 jiwa, hanya ada sebuah SMA Negeri yaitu SMA Bagian A, B, dan C Negeri Blora. Padahal jarak antara Cepu-Blora kurang-lebih 34 kilometer. Di daerah Cepu dan sekitarnya pada saat itu sudah terdapat 4 SMP, yaitu SMP Negeri 1 Cepu, SMP Kristen, SMP Taman Siswa, dan SMP Negeri Padangan (Jawa Timur). Siswa-siswa SMP dari daerah-daerah kecamatan termasuk kecamatan Cepu yang ingin melanjutkan ke SMA terpaksa harus indkost di Blora, mengingat jarak antara Cepu-Blora cukup jauh. Berawal dari hal itulah yang menggerakkan tekad para tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di Cepu untuk mendirikan sebuah SMA Negeri yang berlokasi di kota Cepu.

3. Kondisi SMA Negeri 1 Cepu Saat Ini.

SMA Negeri 1 Cepu terletak di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tepatnya di Jalan Diponegoro no.55 Cepu. Tenaga pengajar yang ada di SMA N 1

Cepu sebanyak 54 guru baik guru tetap (PNS) guru honorer maupun tenaga kontrak dan Staf administrasi sejumlah 20 orang. Jumlah siswa yang ada di SMA N 1 Cepu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6 Jumlah siswa SMA N 1 Cepu 3 tahun terakhir

No	Tahun	Kelas			Jumlah
		X	XI	XII	
1	2010-2011	250	270	259	779
2	2011-2012	255	246	270	771
3	2012-2013	258	245	246	749

Sumber data : www.sman1cepu.sch.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah siswa SMA N 1 Cepu mengalami penurunan mulai dari tahun 2010-2011 sebanyak 779 siswa kemudian turun menjadi 771 siswa pada tahun ajaran 2011-2013, dan menurun lagi pada tahun 2012-2013 menjadi 749 siswa. Penurunan jumlah siswa ini disebabkan karena banyaknya siswa yang pindah ke sekolah lain.

Jumlah kelompok belajar atau kelas yang di SMA N 1 Cepu juga mengalami peningkatan, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Jumlah Kelompok Belajar SMA N 1 Cepu 3 Tahun Terakhir

NO	Tahun	Kelas						Total	
		X	XI		Jumlah	XII			Jumlah
			IPA	IPS		IPA	IPS		
1	2010-2011	7	3	4	7	3	4	7	21
2	2011-2012	7	3	4	7	3	4	7	21
3	2012-2013	8	4	4	8	4	4	8	24

Sumber : sman1cepu.sch.id

Dari data diatas dapat dilihat jumlah kelas yang ada di SMA N 1 Cepu sejumlah 21 kelas mulai tahun 2010-2011 hingga 2011-2012, namun pada tahun 2012-2014 jumlah kelas ditambah 3 kelas baru yaitu penambahan pada kelas X, XI IPA dan XII IPA sehingga jumlah kelas menjadi 24 kelas. Penjurusan yang pada awalnya dilakukan pada saat kenaikan dari kelas X ke kelas XI namun pada tahun ajaran 2013/2014 penjurusan dilakukan pada kelas X yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru.

Sarana prasana yang ada di SMA N 1 Cepu sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA N 1 Cepu diantaranya adalah

Tabel 8. Sarana dan Prasana SMA Negeri 1 Cepu

No	Jenis Ruang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Kelas	24	Cukup	6 ruang perlu direhab
2	Laboratorium PSB	1	Tidak layak	Perlu ruang yang sesuai standar
3	Laboratorium Biologi	1	Baik	
4	Laboratorium Kimia	1	Baik	
5	Laboratorium Fisika	1	Cukup	Perlu rehab
6	Laboratorium Bahasa	1	Tidak layak	
7	Laboratorium Komputer	2	cukup	Perlu ruang yang sesuai standar
8	Ruang perpustakaan	1	Tidak layak	Aslinya ruang tata usaha
9	Ruang tamu	1	baik	
10	Ruang serba guna /Aula	1	cukup	Perlu rehab lantai dan plafon
11	Ruang UKS	1	Baik	
12	Ruang multimedia	1	Tidak layak	Perlu ruangan yang sesuai standar
13	Koperasi siswa	1	baik	Ruangan kurang luas
14	Ruang BP/BK	1	Tidak layak	Ruangan sempit
15	Ruang Kepala Sekolah	1	baik	
16	Ruang guru	1	baik	Kurang luas
17	Ruang kepala TU	1	Baik	
18	Ruang TU	1	baik	Kurang

No	Jenis Ruang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
19	Ruang OSIS	1	baik	
20	Kamar mandi Guru	3	baik	
21	Kamar mandi siswa	9	baik	Kurang sesuai dengan jumlah siswa
22	Gudang	2	baik	
23	Ruang ibadah	1	Baik	
24	Ruang moving class Pendidikan Agama Islam	1	Baik	
25	Rumah penjaga sekolah	1	cukup	Perlu perbaikan
26	Kantin	4	cukup	Perlu pembenahan
27	Ruang Pramuka	1	baik	Kurang luas
28	Ruang Akademik/kurikulum	1	baik	Kurang luas
29	Ruang Drumband	1	baik	
30	Ruang alat musik	1	baik	
31	Ruang Wakasek	1	baik	
32	Ruang piket	1	baik	Kurang luas
33	Ruang kelas cadangan	1	baik	

Sumber : sman1cepu.sch.id

4. Visi SMA Negeri 1 Cepu

Visi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Cepu adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan untuk

menghasilkan peserta didik BERMATA PATRA. Layanan prima pendidikan yang permutu, terjangkau, dan berkeadilan yang dimaksud adalah bermutu baik dalam proses dan hasil pendidikan, dengan biaya terjangkau dan berkeadilan dalam arti masyarakat kurang mampu diperlakukan khusus sesuai dengan kondisi sosial ekonominya. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta didik “Bermata Patra” adalah peserta didik yang BERiMAn, TAqwa dan bermartabat, unggul dalam PrestAsi,TeRAmpil dan bermanfaat. Deskripsi lengkap yang dimaksud dengan Peserta Didik Bermata Patra, adalah sebagai berikut :

- a. Beriman artinya Pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu untuk ikut mengkondisikan siswa memiliki iman yang kuat.
- b. Taqwa artinya Pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu adalah untuk menumbuhkan dan menguatkan ketaqwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bermartabat artinya dari segala proses pendidikan untuk mencapai tertingkatnya derajat para siswa sebagai makhluk yang berbudaya, berkarakter dan berpengetahuan tinggi.
- d. Unggul dalam prestasi artinya dari segala proses pendidikan untuk mewujudkan baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik lebih tinggi, lebih baik, lebih cakap dari pada yang lain.
- e. Terampil artinya dari segala proses pendidikan untuk mencapai tertingkatnya ketrampilan, agar menjadi manusia yang berguna bagi Negara, Bangsa dan Masyarakat.

- f. Bermanfaat artinya dari segala proses pendidikan untuk mewujudkan para siswa menjadi manusia yang bermanfaat bagi Negara, Bangsa dan Masyarakat dalam kehidupan nyata.

6. Misi SMA Negeri 1 Cepu.

Misi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Cepu adalah :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia yang mencakup etika, dan budi pekerti.
- b. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, bim-bingan, dan pelatihan secara efektif, efisien dan berkesinambungan.
- c. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pelayanan bimbingan karier dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana pengembangan diri siswa secara optimal.
- d. Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, sebagai sumber kearifan siswa dalam berperilaku dan bertindak baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat.
- e. Menumbuhkan motivasi dan komitmen yang tinggi untuk mencapai prestasi dan keunggulan dalam setiap ajang kompetisi.
- f. Mengembangkan wawasan IPTEK yang mendalam dan luas, kecakapan hidup dan keterampilan kepada seluruh siswa sebagai bekal untuk hidup mandiri dan studi lanjut.

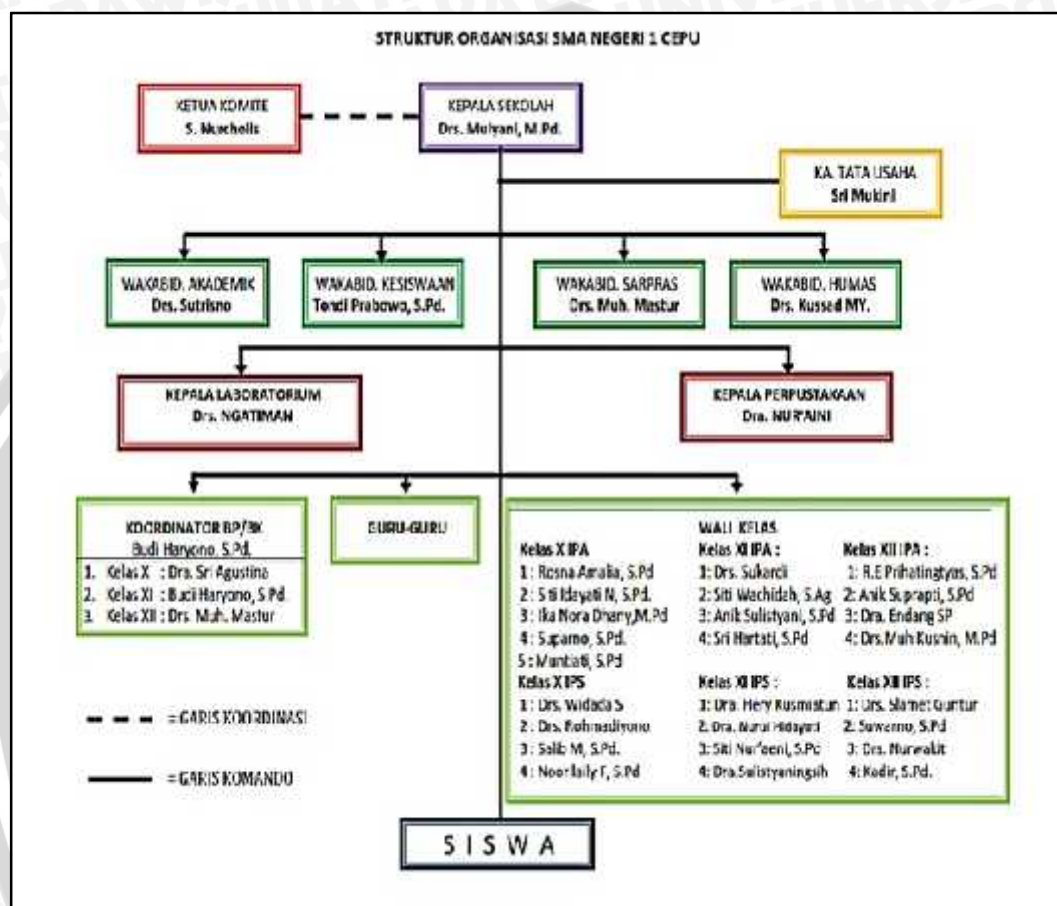
- g. Membangun citra positif masyarakat terhadap sekolah melalui penerapan manajemen yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif serta pelayanan prima yang ramah dan amanah.

7. Tujuan SMA Negeri 1 Cepu.

Tujuan dari SMA Negeri 1 Cepu adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan Sistem Pengujian Berbasis Kompetensi (KSPBK) dengan pendidikan berbasis kecakapan hidup (lifeskill).
- b. Meningkatkan pelaksanaan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).
- c. Meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian akhir nasional.
- d. Meningkatkan pencapaian prestasi dan keunggulan dalam ajang kompetisi bidang akademik dan non akademik.
- e. Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui SPMB dan Jalur Undangan.
- f. Meningkatkan jumlah dan kualitas siswa dalam menguasai seni budaya, dan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
- g. Meningkatkan jumlah dan kualitas tim olah raga.
- h. Meningkatkan jumlah dan kualitas kemampuan guru dalam mengajar berbasis ICT dan E_learning.
- i. Melaksanakan penerapan SIM untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta pelayanan prima yang ramah dan amanah.
- j. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan.

8. Struktur Organisasi Sekolah



Gambar 3. Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Cepu

Sumber data : www.sman1cepu.sch.id

Dalam memimpin sekolah, Kepala Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah yang berisi orang tua dan wali murid dari siswa SMA N 1 Cepu yang dipimpin oleh Ketua Komite. Untuk masalah administrasi sekolah diurus oleh pegawai tata usaha sekolah yang dipimpin oleh Ketua Tata Usaha (Ka TU). Kemudian tugas Kepala Sekolah dibantu oleh 4 orang Wakil Kepala Sekolah yang masing masing membidangi masalah akademik/kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta

hubungan masyarakat. Dibawah Wakil Kepala Sekolah Terdapat Kepala Laboratorium dan Kepala Perpustakaan. Kemudian posisi terbawah ada guru yang terdiri dari wali kelas, guru BP/BK dan guru yang mengajar mata pelajaran.

B. Analisis Deskriptif.

Distribusi frekuensi jawaban responden atas masing masing item pada kuesioner penelitian didistribusikan kedalam tabel distribusi frekuensi dan dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Dapat diketahui jumlah skor untuk tiap variabel dengan skala likert yaitu 5 untuk jawaban sangat setuju, 4 untuk jawaban setuju, 3 untuk jawaban cukup setuju, 2 untuk jawaban tidak setuju, 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.

1. Gambaran Umum Responden.

Responden dalam penelitian ini adalah guru yang ada di SMA N 1 Cepu sebanyak 54 guru baik yang bestatus PNS maupun pegawai kontrak. Berikut ini disajikan tabel mengenai deskripsi karakteristik responden yang berhubungan dengan penelitian yang dikelompokkan berdasarkan. usia responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan lama bekerja sebagai guru.

a. Usia Responden

Usia responden biasanya berkaitan dengan pengalaman serta kecakapan dan kecepatan dalam bekerja. Penyajian data responden berdasarkan usia sebagai berikut :

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
21-30	6
31-40	9
41-50	19
51-60	20

Sumber : Data Olahan, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa umur responden yang terbanyak adalah pada rentang usia 51 sampai dengan 60 tahun yaitu sebanyak 20 orang atau sekitar 37,03%, diikuti oleh rentang usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 19 orang atau sekitar 35,19%, rentang usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 9 orang atau sekitar 16,67% dan rentang usia 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 6 orang atau sekitar 11,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang ada di SMA N 1 Cepu berada pada usia yang bisa dikatakan berpengalaman dalam mengajar. Guru tersebut sudah mengajar sejak lama di SMA N 1 Cepu sehingga mereka mengenal betul bagaimana kondisi sekolah.

b. Jenis kelamin.

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada perilaku seseorang. Dalam suatu bidang kerja jenis kelamin seringkali dapat menjadi pembeda aktivitas yang dilakukan oleh individu. Penyajian data responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	28
Wanita	26

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah pria sebanyak 28 orang atau sekitar 51,85%. Jumlah tersebut hanya berbeda sedikit dengan wanita sebanyak 26 orang atau sekitar 48,15%. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru tidak bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu pria maupun wanita.

c. Pendidikan Terakhir.

Pendidikan erat kaitannya dengan kondisi yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan bagaimana melakukan suatu pekerjaan. Penyajian data responden berdasarkan pendidikan terakhir responden sebagai berikut:

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah
Sarjana (S-1)	51
Magister (S-2)	3

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir yang paling banyak dimiliki oleh Guru yang ada di SMA N 1 Cepu adalah Sarjana (S-1) sebanyak 51 orang atau sekitar 94,44%. Hal ini sangat berbeda dengan Guru yang memiliki pendidikan Magister (S-2) yang hanya 3 orang atau 5,56%. Hal ini

menunjukkan bahwa tugas yang diemban oleh guru sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, selain itu ada beberapa Guru yang sedang menempuh pendidikan Magister sehingga nantinya akan semakin banyak guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi.

d. Lama Bekerja Sebagai Guru.

Pengalaman Guru dalam bekerja dapat diukur melalui lamanya Guru dalam menjalani profesinya. Pengertian lama disini adalah berapa tahun Guru mengajar mulai dari pertama kali mengajar hingga saat ini. Penyajian data responden berdasarkan lama bekerja responden sebagai berikut:

Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja (tahun)

Lama Bekerja	Jumlah
1-5	9
6-10	7
11-15	5
16-20	8
21-25	7
26-30	11
>30	7

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa guru yang ada di SMA N 1 Cepu sudah mengajar lebih dari 30 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 12,96%. Jumlah yang paling banyak adalah guru yang sudah mengajar selama 26 sampai dengan 30 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 20,37%. Guru yang sudah mengajar selama 21 sampai dengan 25 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 12,96%. Guru yang sudah mengajar selama 16 sampai dengan 20 tahun sebanyak

8 orang atau sekitar 14,81%. Guru yang sudah mengajar selama 11 sampai dengan 15 tahun sebanyak 5 orang atau sekitar 9,26%. Guru yang sudah mengajar selama 6 sampai dengan 10 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 12,96%. Dan guru yang baru mengajar selama 1 sampai 5 tahun sebanyak 9 orang atau sekitar 16,67%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang ada di SMA N 1 Cepu memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama.

C. Deskripsi Hasil Penelitian.

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 56 responden melalui penyebaran kuesioner untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban dari masing masing variabel. Jawaban didasarkan kepada rentang jawaban yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setelah kuesioner dikembalikan maka jawaban dari kuesioner tersebut akan dianalisis. Analisis jawaban dari responden ini bertujuan untuk mengetahui gambaran deskriptif mengenai responden dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel variabel yang digunakan.

1. Variabel Kompetensi Guru (X1)

Variabel kompetensi guru diukur melalui beberapa indikator yang terdiri dari latar belakang pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman organisasi, komunikasi serta sertifikasi guru. Dari 5 indikator tersebut dijabarkan kedalam 17 pertanyaan. Hasil tanggapan responden terhadap kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden Tentang Kompetensi Guru

ITEM	JAWABAN				
	SS	S	CS	TS	STS
X1.1	47	6	1	0	0
X1.2	40	13	1	0	0
X1.3	41	12	1	0	0
X1.4	31	20	3	0	0
X1.5	34	17	3	0	0
X1.6	31	21	2	0	0
X1.7	23	27	4	0	0
X1.8	31	23	0	0	0
X1.9	30	22	2	0	0
X1.10	18	22	14	0	0
X1.11	28	16	6	4	0
X1.12	41	11	2	0	0
X1.13	35	14	5	0	0
X1.14	33	18	2	1	0
X1.15	25	26	3	0	0
X1.16	19	30	5	0	0
X1.17	28	26	0	0	0

Sumber : Data Olahan, 2014

Keterangan :

X1.1 : Tanggapan responden terhadap pernyataan pendidikan minimal yang harus dimiliki seorang guru

X1.2 : Tanggapan responden terhadap pernyataan latar belakang pendidikan yang dimiliki seorang guru harus sesuai dengan tugas yang di jalannya

X1.3 : Tanggapan responden terhadap pernyataan Diklat dan Penataran yang pernah diikuti sangat membantu dalam pengembangan diri

X1.4 : Tanggapan responden terhadap pernyataan PTK merupakan salah satu sarana peningkatan kreatifitas, inovasi dan pengembangan diri

X1.5 : Tanggapan responden terhadap pernyataan ilmu yang didapatkan dari pendidikan formal/informal digunakan dalam proses belajar mengajar

X1.6 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa guru mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

X1.7 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa guru dalam proses belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

X1.8 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa guru memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mencari bahan ajar dan informasi terbaru

X1.9 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa guru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memiliki kinerja yang lebih baik

X1.10 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru pernah mengikuti organisasi baik ditingkat nasional/provinsi/kabupaten/kecamatan/sekolah.

X1.11 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru pernah menduduki posisi dalam organisasi sebagai ketua/wakil ketua/sekertaris/bendahara/seksi-seksi/anggota

X1.12 : Tanggapan responden terhadap pernyataan komunikasi merupakan aspek penting dalam kegiatan belajar mengajar

X1.13 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun

X1.14 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru berkomunikasi kepada semua orang secara objektif dan tidak diskriminatif

X1.15 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa sertifikasi guru merupakan bukti bahwa guru sudah kompeten di bidangnya.

X1.16 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa guru yang sudah disertifikasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang belum disertifikasi.

X1.17 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa PLPG merupakan bahan evaluasi bagi penerima sertifikasi dan calon penerima sertifikasi untuk melihat kompetensi dibidangnya.

Pada pernyataan pertama mengenai latar belakang pendidikan yang harus dimiliki guru adalah Sarjana (S-1) dari ilmu pendidikan 47 responden atau sekitar 87,04% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jawaban lain dari responden

menunjukkan bahwa 6 responden atau sekitar 11,11% setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai seorang guru bisa dilakukan oleh semua orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana ilmu pendidikan.

Pada pernyataan kedua mengenai kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas yang dilakukan oleh guru 40 responden atau sekitar 74,07% menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jawaban lain dari responden menunjukkan bahwa 13 responden atau sekitar 24,07% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,86% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan kesesuaian latar belakang pendidikan yang dimiliki harus sesuai dengan tugas yang dilakukan adalah hal yang penting. Sesuai dengan istilah "*the right man in the right place*" sehingga mereka tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas sebagai seorang guru.

Pada pernyataan ketiga mengenai Diklat dan Penataran yang pernah diikuti sangat membantu dalam pengembangan diri pendidik 41 responden atau sekitar 75,93% menjawab sangat setuju. Jawaban lain dari responden menunjukkan bahwa 12 responden atau sekitar 22,22% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa diklat dan penataran guru merupakan salah satu cara bagi seorang guru untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan yang nantinya akan digunakan dalam tugas sehari-hari.

Pada pernyataan keempat mengenai PTK merupakan salah satu sarana peningkatan kreatifitas, inovasi dan pengembangan diri 31 responden atau sekitar 57,41% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 20 responden atau sekitar 37,04% menjawab setuju dan 3 responden atau sekitar 5,55% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas merupakan sarana bagi guru untuk mengembangkan diri, berinovasi dan berkreatifitas.

Pada pernyataan kelima mengenai ilmu yang didapatkan dari pendidikan formal/informal digunakan dalam proses belajar mengajar 34 responden atau sekitar 62,96% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 17 responden atau sekitar 31,48% menjawab setuju dan 3 responden atau sekitar 5,56% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang didapatkan dari pendidikan formal maupun informal memang harus digunakan dalam proses belajar mengajar, namun perlu adanya proses pilah-memilah mana yang sesuai.

Pada pernyataan keenam mengenai guru mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 31 responden atau sekitar 57,41% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 21 responden atau sekitar 38,89% menjawab setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan teknologi dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan menuntut seorang guru untuk menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada pernyataan ketujuh mengenai guru dalam proses belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi jawaban terbanyak yaitu 27 responden atau sekitar 50% menjawab setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 23 responden atau sekitar 42,59% menjawab sangat setuju dan 4 responden atau sekitar 7,41% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa cara mengajar klasik yaitu dengan cara berbicara langsung ke peserta didik dirasa kurang efektif lagi untuk menarik minat. Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan laptop dan lcd untuk pembelajaran dikelas lebih menarik minat peserta didik untuk mengikuti pelajaran.

Pada pernyataan kedelapan mengenai guru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari bahan ajar dan informasi terbaru 31 responden atau sekitar 57,41% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 23 responden atau sekitar 42,59% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh teknologi menjadikan semakin mudahnya guru dalam mencari bahan ajar seperti materi pembelajaran, silabus, RPP, latihan soal, maupun buku elektronik. Selain itu teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi terbaru seperti informasi Ujian Nasional, kenaikan gaji guru, sertifikasi guru, dsb.

Pada pernyataan kesembilan mengenai guru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang tidak menggunakannya jawaban terbanyak yaitu 30 responden atau sekitar 55,56% menjawab setuju. Jawaban lain menunjukkan 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab sangat setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70%

menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dapat mempermudah dan meringankan. Sesuai dengan pernyataan ketujuh bahwa penggunaan teknologi yang lebih menarik minat peserta didik. Dengan kemudahan yang diberikan teknologi akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dari seorang guru.

Pada pernyataan kesepuluh mengenai tingkatan organisasi yang diikuti oleh guru, jawaban terbanyak yang diperoleh yaitu 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab setuju jika guru di SMA N 1 Cepu pernah mengikuti organisasi baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, sampai dengan tingkat sekolah. Jawaban lain menunjukkan bahwa 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab cukup setuju dan 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi menjadi bagian yang penting dalam mengemban tugas sebagai seorang guru selain tugas utamanya dalam proses belajar mengajar. Dari jawaban diatas menunjukkan bahwa semua guru yang ada di SMA N 1 Cepu pernah mengikuti organisasi baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, ataupun sekolah.

Pada pernyataan kesebelas mengenai guru yang di SMA N 1 Cepu pernah menduduki posisi dalam organisasi baik sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi maupun sebagai anggota 28 responden atau sekitar 51,85% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan 16 responden atau sekitar 29,63% menjawab setuju, 6 responden atau sekitar 11,11% menjawab cukup setuju dan 4 responden atau sekitar 7,41% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebgain besar guru di SMA N 1 Cepu menduduki posisi

penting didalam organisasi baik itu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, maupun anggota.

Pada pernyataan keduabelas mengenai komunikasi merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar 41 responden atau sekitar 75,93% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 11 responden atau sekitar 20,37% menjawab setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memang menjadi aspek penting dalam proses belajar mengajar. Komunikasi merupakan sarana untuk *transfer* ilmu dari guru ke peserta didik. Dengan komunikasi yang baik maka diharapkan ilmu yang diberikan mampu diserap dengan baik oleh peserta didik.

Pada pernyataan ketigabelas mengenai guru selalu berkomunikasi secara efektif empatik dan santun 35 responden atau sekitar 64,81% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab setuju dan 5 responden atau sekitar 9,26% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang guru memang harus berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun baik itu ke peserta didik maupun ke sesama guru dan masyarakat.

Pada pernyataan keempatbelas mengenai guru selalu berkomunikasi secara kepada semua orang secara objektif dan tidak diskriminatif 33 responden atau sekitar 61,11% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab setuju, 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab cukup setuju dan 1 responden atau sekitar 1,86% menjawab tidak

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru selalu berkomunikasi kepada semua orang tanpa memandang siapapun dan berbicara apa adanya.

Pada pernyataan kelimabelas mengenai sertifikasi merupakan bukti seorang guru sudah kompeten dibidangnya jawaban terbanyak yaitu 26 reponden atau sekitar 48,15% menjawab setuju. Jawaban lain menunjukkan 25 reponden atau sekitar 46,30% dan 3 reponden atau sekitar 5,55% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi merupakan bukti seorang guru sudah kompeten dibidangnya.

Pada pernyataan keenambelas mengenai guru yang sudah disertifikasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang belum disertifikasi jawaban terbanyak yaitu 30 responden atau sekitar 55,56% menjawab setuju. Jawaban lain menunjukkan 19 responden atau sekitar 35,19% menjawab sangat setuju dan 5 responden atau sekitar 9,25% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa cara kerja mereka yang sudah disertifikasi dengan yang belum memiliki perbedaan.

Pada pernyataan ketujuhbelas mengenai PLPG sebagai bahan evaluasi bagi penerima maupun calon penerima sertifikasi untuk melihat kompetensi dibidangnya 28 responden atau sekitar 51,85% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 26 responden atau sekitar 48,15% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan PLPG berfungsi untuk mengevaluasi bagi penerima sertifikasi apakah masih layak untuk menerima tunjangan sertifikasi dan bagi calon penerima untuk melihat kelayakannya untuk menerima sertifikasi.

2. Variabel Kedisiplinan (X2).

Variabel kedisiplinan guru diukur melalui beberapa indikator yang terdiri dari prosentase kehadiran, tepat waktu, pelaksanaan tata terbib dan tanggung jawab terhadap tugas. Dari 4 indikator tersebut dijabarkan kedalam 15 pertanyaan. Hasil tanggapan responden terhadap kedisiplinan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Distribusi Jawaban Responden Tentang Kedisiplinan Guru

ITEM	JAWABAN				
	SS	S	CS	TS	STS
X2.1	40	14	0	0	0
X2.2	36	17	1	0	0
X2.3	32	21	1	0	0
X2.4	36	18	0	0	0
X2.5	30	24	0	0	0
X2.6	37	17	0	0	0
X2.7	42	12	0	0	0
X2.8	37	16	1	0	0
X2.9	27	25	2	0	0
X2.10	32	20	2	0	0
X2.11	25	26	3	0	0
X2.12	28	22	4	0	0
X2.13	30	24	0	0	0
X2.14	34	20	0	0	0
X2.15	26	26	2	0	0

Sumber : Data Olahan, 2014

Keterangan :

X2.1 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu hadir setiap hari kerja untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik

X2.2 : Tanggapan responden terhadap pernyataan penerapan absensi sidik jari sangat membantu untuk melihat tingkat kehadiran secara nyata

X2.3 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru datang sebelum jam kerja dimulai dan pulang pada jam yang telah ditentukan.

X2.4 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru mengajar sesuai dengan jadwal dan apabila berhalangan hadir memberikan tugas kepada peserta didik.

X2.5 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru memanfaatkan waktu luang saat tidak mengajar untuk mengembangkan diri dan mencari bahan ajar

X2.6 : Tanggapan responden terhadap pernyataan tata tertib sekolah dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di lingkungan sekolah

X2.7 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru berseragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

X2.8 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu mengikuti upacara bendera pada hari senin dan peringatan hari besar lainnya

X2.9 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu menggunakan tanda pengenal baik disekolah maupun saat tugas diluar sekolah

X2.10 : Tanggapan responden terhadap pernyataan pimpinan di sekolah menciptakan kebiasaan berdisiplin

X2.11 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru siap menerima sanksi sebagai konsekuensi melanggar peraturan

X2.12 : Tanggapan responden terhadap pernyataan hukuman yang diberikan pimpinan bersifat tegas namun bersifat mendidik

X2.13 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas.

X2.14 : Tanggapan responden terhadap pernyataan guru selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

X2.15 : Tanggapan responden terhadap pernyataan kesiapan guru jika sewaktu waktu diberi tugas oleh pimpinan walaupun itu bukan hari kerja.

Pada pernyataan pertama mengenai kehadiran guru di tempat kerja 40 responden atau sekitar 74,07% menjawab sangat setuju jika guru yang ada di SMA N 1 Cepu selalu hadir setiap hari kerja untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Jawaban lain menunjukkan bahwa 14 responden atau sekitar 25,93% setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas menunjukkan guru jika tidak ada halangan atau sakit, mereka selalu hadir di tempat kerja dan menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik.

Pada pernyataan kedua mengenai penerapan absensi sidik jari di SMA N 1 Cepu 36 responden atau sekitar 66,67% menjawab sangat setuju jika penerapan absensi sidik jari sangat membantu untuk melihat tingkat kehadiran secara nyata. Jawaban lain menunjukkan bahwa 17 responden atau sekitar 31,48% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab cukup setuju. Dari hal diatas menunjukkan absensi sidik jari sangat membantu untuk melihat tingkat kehadiran dengan akurat. Berbeda dengan dengan absensi manual yang bisa diakali dengan titip tanda tangan atau tanda tangan satu hari untuk satu minggu kerja. Penerapan absensi sidik jari ini “memaksa” guru untuk datang kesekolah sehingga tingkat kehadiran guru yang ada disekolah bisa meningkat.

Pada pernyataan ke tiga mengenai ketepatan waktu 32 responden atau sekitar 59,26% menjawab sangat setuju jika guru datang sebelum jam kerja dimulai dan pulang pada jam yang telah ditetapkan. Jawaban lain menunjukkan bahwa 21 responden atau sekitar 38,89% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab cukup setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa dengan penerapan absensi sidik jari guru hanya bisa

mengabsen sebelum jam kerja dan absen pulang setelah jam kerja yang telah ditentukan.

Pada pernyataan keempat mengenai jam mengajar guru 36 responden atau sekitar 66,67% sangat setuju jika guru datang mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan dan bila berhalangan hadir memberikan tugas kepada peserta didik. Jawaban lain menunjukkan bahwa 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab setuju. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa tingkat kedisiplinan tidak hanya tepat waktu datang dan pulang kerja tetapi juga tepat waktu dalam mengajar.

Pada pernyataan kelima mengenai pemanfaatan waktu luang jawaban 30 responden atau sekitar 55,56% menjawab sangat setuju jika guru memanfaatkan waktu waktu luang saat tidak mengajar untuk mengembangkan diri dan mencari bahan ajar. Jawaban lain menunjukkan 24 responden atau sekitar 44,44% menjawab setuju. Sebagai contoh guru olahraga hanya mengajar sampai jam 10 pagi. Dengan waktu luang tersebut maka guru bisa memanfaatkan waktunya untuk mencari bahan ajar ataupun hal hal lain yang berkaitan tugasnya sebagai seorang pendidik maupun tugas di organisasi sekolah.

Pada pernyataan keenam mengenai pelaksanaan tata tertib 37 responden atau sekitar 68,52% menjawab sangat setuju jika pelaksanaan tata tertib yang ada di Sekolah dilaksanakan oleh semua pihak baik Kepala Sekolah, Guru, Karyawan maupun siswa tanpa terkecuali. Jawaban lain menunjukkan bahwa 17 responden atau sekitar 31,48% menjawab setuju dengan pernyataan diatas. Dari

hal diatas dapat dilihat pelaksanaan tata tertib dilaksanakan oleh semua pihak tanpa terkecuali termasuk pimpinan yang membuat peraturan itu sendiri.

Pada pernyataan ketujuh mengenai penggunaan seragam 42 responden atau sekitar 77,78% menjawab sangat setuju jika guru berseragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Jawaban lain menunjukkan bahwa 12 responden atau sekitar 22,22% menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat seragam merupakan bagian dari disiplin. Bagi guru yang tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan maka akan terlihat berbeda dengan mereka yang menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan. Dengan menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan maka akan memberi contoh yang baik ke peserta didik mengenai penggunaan seragam.

Pada pernyataan kedelapan mengenai ikut serta dalam upacara 37 responden atau sekitar 68,52% menjawab sangat setuju jika guru selalu mengikuti upacara bendera setiap hari senin atau peringatan hari besar lainnya. Jawaban lain menunjukkan bahwa 16 responden atau sekitar 29,63% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab cukup setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa disiplin guru juga dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam upacara baik hari senin maupun peringatan hari besar seperti Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, HUT PGRI, dll. Tidak hanya sebagai peserta upacara terkadang pada momen tertentu guru diberi tugas untuk

menjadi petugas upacara. Dengan mengikuti upacara dengan baik dan tertib maka akan memberi contoh disiplin yang baik kepada peserta didik.

Pada pernyataan kesembilan mengenai penggunaan tanda pengenal 27 responden atau sekitar 50% menjawab sangat setuju jika guru selalu menggunakan tanda pengenal baik dalam tugas disekolah maupun diluar sekolah. Jawaban lain menunjukkan bahwa 25 responden atau sekitar 46,30% menjawab setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% cukup setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa pentingnya penggunaan tanda pengenal bagi guru baik PNS maupun Guru Tidak Tetap (GTT) untuk meningkatkan kedisiplinan.

Pada pernyataan kesepuluh mengenai pimpinan yang menciptakan kebiasaan disiplin 32 responden atau sekitar 59,26% menjawab sangat setuju. Jawaban lain menunjukkan bahwa 20 responden atau sekitar 37,04% menjawab setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab cukup setuju. Dari hal diatas dapat dilihat pimpinan mampu memberi contoh untuk melaksanakan kebiasaan berdisiplin yang bisa dicontoh oleh guru.

Pada pernyataan kesebelas mengenai penerimaan sanksi jawaban terbanyak yang didapat adalah 26 responden atau sekitar 48,15% menjawab setuju jika guru siap menerima sanksi sebagai konsekuensi jika melanggar peraturan. Jawaban lain menunjukkan bahwa 25 responden atau sekitar 46,30% menjawab sangat setuju dan 3 responden atau sekitar 5,55% menjawab cukup setuju dengan dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa

disiplinan tidak hanya melaksanakan peraturan tetapi juga bagaimana guru siap menerima sanksi jika melanggar.

Pada pernyataan keduabelas mengenai hukuman yang diberikan 28 responden atau sekitar 51,85% menjawab sangat setuju jika hukuman yang diberikan pimpinan bersifat tegas namun mendidik. Jawaban lain menunjukkan bahwa 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab setuju dan 4 responden atau sekitar 7,41% menjawab cukup setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa pemberian hukuman tidak hanya bersifat tegas sehingga menimbulkan efek jera, tetapi juga harus bersifat mendidik agar pelanggar tidak mengulanginya lagi.

Pada pernyataan ketigabelas mengenai kesiapan dalam bertugas 30 responden atau sekitar 55,56% menjawab sangat setuju jika guru selalu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas dalam mengajar ataupun tugas lainnya. Jawaban lain menunjukkan bahwa 24 responden atau sekitar 44,44% menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa kesiapan guru menjadi hal penting karena akan berpengaruh dengan apa yang akan dikerjakan.

Pada pernyataan keempatbelas mengenai tanggung jawab tugas 34 responden atau sekitar 62,96% menjawab sangat setuju jika guru selalu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jawaban lain menunjukkan bahwa 20 responden atau sekitar 37,04% menjawab setuju dengan pernyataan

tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat sebagai seorang guru melaksanakan tugas tentu harus dengan tanggung jawab.

Pada pernyataan kelimabelas mengenai kesiapan saat diberi tugas jawaban terbanyak yaitu 26 responden atau sekitar 48,15% menjawab sangat setuju dan 26 responden atau sekitar 48,15% menjawab setuju jika guru selalu siap saat sewaktu waktu diberi tugas oleh pimpinan walaupun itu bukan hari kerja. Jawaban lain menunjukkan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab cukup setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa guru harus selalu siap saat diberi tugas oleh pimpinan walaupun bukan hari kerja selama hal tersebut masih dalam jangkauan dari pekerjaannya.

3. Variabel Kualitas Layanan Pendidikan (Y)

Variabel kualitas layanan pendidikan diukur melalui 2 indikator yang terdiri dari prestasi sekolah dan hasil lulusan. Dari 2 indikator tersebut dijabarkan kedalam 10 pertanyaan. Kualitas layanan pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari segi lulusan yang dihasilkan. Kualitas dari lulusan ini dilihat dari hasil nilai Ujian Nasional dan Prestasi yang telah diraih oleh siswa. Hasil tanggapan responden terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden Tentang Kualitas Layanan Pendidikan

ITEM	JAWABAN				
	SS	S	CS	TS	STS
Y.1	41	12	0	1	0
Y.2	11	31	11	1	0
Y.3	10	18	22	4	0
Y.4	15	31	3	5	0
Y.5	14	27	9	4	0
Y.6	36	14	4	0	0
Y.7	18	22	13	1	0
Y.8	18	25	9	2	0
Y.9	14	22	14	2	2
Y.10	12	15	25	2	0

Sumber : Data Olahan, 2014

Keterangan :

Y.1 : Tanggapan responden terhadap pernyataan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran sudah sesuai dengan KKM sekolah yaitu 75

Y.2 : Tanggapan responden terhadap pernyataan nilai mata pelajaran yang diajar selalu diatas 80

Y.3 : Tanggapan responden terhadap pernyataan siswa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi lomba mata pelajaran baik ditingkat nasional/provinsi/kabupaten

Y.4 : Tanggapan responden terhadap pernyataan siswa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi lomba non akademik (olahraga, senin, PBB, dll.) baik ditingkat nasional/provinsi/kabupaten

Y.5 : Tanggapan responden terhadap pernyataan siswa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi lomba karya ilmiah baik ditingkat nasional/provinsi/kabupaten.

Y.6 : Tanggapan responden terhadap pernyataan tingkat kelulusan sekolah selama 5 tahun terakhir selalu 100%

Y.7 : Tanggapan responden terhadap pernyataan ranking nilai rata rata ujian nasional ditingkat kabupaten selalu peringkat 3 besar

Y.8 : Tanggapan responden terhadap pernyataan jumlah lulusan yang melanjutkan keperguruan tinggi selama 5 tahun terakhir selalu diatas 70%

Y.9 : Tanggapan responden terhadap pernyataan jumlah lulusan yang langsung bekerja setelah lulusan SMA selama 5 tahun terakhir selalu diatas 10%

Y.10: Tanggapan responden terhadap pernyataan jumlah lulusan yang menganggur/menunggu kerja setelah lulus SMA selama 5 tahun terakhir kurang dari 5%

Pada pernyataan pertaman mengenai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 41 responden atau sekitar 75,93% menjawab sangat setuju jika KKM mata pelajaran yang diajarkan sudah sesuai dengan KKM sekolah. Jawaban lain menunjukkan 12 responden atau sekitar 22,22% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KKM mata pelajaran sudah sesuai dengan dengan KKM yang ada disekolah yaitu 75. Fungsi dari KKM ini adalah untuk menentukan batas ketuntasan nilai mata pelajaran siswa. Jadi jika nilai siswa kurang dari 75 maka haru melakukan perbaikan dengan nilai maksimal setelah perbaikan adalah 75.

Pada pernyataan kedua mengenai nilai rata rata mata pelajaran jawaban terbanyak yaitu 31 responden atau sekitar 57,41% menjawab setuju jika nilai rata rata mata pelajaran yang diajarkan selalu diatas nilai 80. Jawaban lain menunjukkan 11 responden atau sekitar 20,37% menjawab sangat setuju, 11 responden atau sekitar 20,37% menjawab cukup setuju, dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai rata rata mata pelajaran yang ada di SMA N 1 Cepu selalu diatas 80. Dengan

KKM sekolah yang berada pada nilai 75 tentu saja untuk mendapat nilai rata rata 80 dapat dikatakan mudah. Nilai rata rata yang tinggi ini nantinya juga akan bermanfaat bagi peserta didik yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka mampu untuk bersaing dengan sekolah lain.

Pada pernyataan ketiga mengenai prestasi dibidang akademik jawaban terbanyak yaitu 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab cukup setuju jika siswa SMA N 1 Cepu selalu meraih prestasi dibidang lomba akademik baik itu ditingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten selama 5 tahun terakhir. Jawaban lain menunjukkan 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab setuju, 10 reponden atau sekitar 18,52% menjawab sangat setuju dan 4 responden atau sekitar 7,41% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi akademik baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten

Pada pernyataan keempat mengenai prestasi dibidang non-akademik jawaban terbanyak yaitu 31 responden atau sekitar 57,41% menjawab setuju jika siswa SMA N 1 Cepu selalu meraih prestasi dibidang lomba non-akademik (olahraga, seni, PBB, dll) baik itu ditingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten selama 5 tahun terakhir. Jawaban lain menunjukkan 15 responden atau sekitar 27,78% menjawab sangat setuju, 5 reponden atau sekitar 9,26% menjawab tidak setuju dan 3 responden atau sekitar 5,56% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi non-akademik baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Pada pernyataan kelima mengenai prestasi dibidang karya ilmiah jawaban terbanyak yaitu 27 responden atau sekitar 50% menjawab setuju jika siswa SMA N 1 Cepu selalu meraih prestasi dibidang lomba karya ilmiah baik itu ditingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten selama 5 tahun terakhir. Jawaban lain menunjukkan 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab sangat setuju, 9 reponden atau sekitar 16,67% menjawab cukup setuju dan 4 responden atau sekitar 7,41% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir selalu meraih prestasi lomba karya ilmiah baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Pada pernyataan keenam mengenai tingkat kelulusan 36 responden atau sekitar 66,67% menjawab sangat setuju jika tingkat kelulusan SMA N 1 Cepu selama 5 tahun terakhir selalu 100%. Jawaban lain menunjukkan 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab setuju dan 4 responden atau sekitar 7,40% menjawab cukup setuju. Hal ini menunjukkan tingkat kelulusan di SMA N 1 Cepu memang selalu 100% selama 5 tahun terakhir.

Pada pernyataan ketujuh mengenai rangking nilai rata rata ujian nasional jawaban terbanyak yaitu 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab setuju jika rangking nilai rata rata mata pelajaran ujian nasional selalu berada pada kisaran 3 besar. Jawaban lain menunjukkan 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab sangat setuju, 13 responden atau sekitar 24,07% menjawab cukup setuju, dan 1 responden atau sekitar 1,85% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata rata ujian nasional SMA 1 Cepu sebagian besar selalu berada pada 3 besar dan bahkan ada yang berada pada peringkat pertama.

Pada pernyataan kedelapan mengenai lulusan yang melanjutkan keperguruan tinggi jawaban terbanyak yaitu 25 responden atau sekitar 46,30% menjawab setuju jika jumlah lulusan dari SMA 1 Cepu yang melanjutkan keperguruan tinggi selama 5 tahun terakhir prosentasenya diatas 75%. Jawaban lain menunjukkan bahwa 18 responden atau sekitar 33,33% menjawab sangat setuju, 9 responden atau sekitar 16,67% menjawab cukup setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab tidak setuju. Hal ini ,menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMA N 1 Cepu setelah lulus SMA melanjutkan keperguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri, swasta maupun ikatan dinas. Selain itu banyak juga siswa yang diterima diperguruan tinggi baik dari jalur prestasi, ujian tulis maupun ujian mandiri.

Pada pernyataan kesembilan mengenai lulusan yang melanjutkan untuk bekerja jawaban terbanyak yaitu 22 responden atau sekitar 40,74% menjawab setuju jika jumlah lulusan yang langsung bekerja setelah lulus SMA selama 5 tahun terakhir selalu diatas 10%. Jawaban lain menunjukkan 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab cukup setuju, 14 responden atau sekitar 25,93% menjawab sangat setuju, 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab tidak setuju, dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang langsung bekerja memang jumlahnya jauh lebih kecil daripada mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kecilnya jumlah lulusan yang langsung bekerja ini mengingat bahwa fungsi dari SMA adalah menciptakan lulusan yang siap bersaing di pendidikan yang lebih tinggi.

Pada pernyataan kesepuluh mengenai jumlah lulusan yang menganggur atau menunggu bekerja jawaban terbanyak 25 responden atau sekitar 46,30% menjawab cukup setuju jika jumlah lulusan yang menganggur atau menunggu bekerja setelah lulus SMA selama 5 tahun terakhir kurang dari 5%. Jawaban lain menunjukkan bahwa 15 responden atau sekitar 27,78% menjawab setuju, 12 responden atau sekitar 22,22% menjawab sangat setuju dan 2 responden atau sekitar 3,70% menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lulusan yang menganggur atau menunggu kerja memang jumlahnya kurang dari 5%.

D. Analisis data.

1. Uji Kualitas data.

Uji kualitas data bertujuan untuk melihat data yang telah didapat apakah merupakan data yang benar dan valid. Dengan kualitas data yang baik maka akan meminimalisir kesalahan data yang ada dan data tersebut layak untuk dijadikan bahan penelitian. Uji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun hasil uji kualitas data dalam penelitian ini adalah :

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Besarnya r_{tabel} dengan degree of freedom (derajat bebas) $(n-2)$ dan $n=54$ sehingga ditemukan r tabel sebesar. Kriteria pengujiannya adalah instrument dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel Berikut ini :

Tabel 16. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Guru

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X1.1	0.545	0.263	valid
X1.2	0.625	0.263	valid
X1.3	0.599	0.263	valid
X1.4	0.590	0.263	valid
X1.5	0.630	0.263	valid
X1.6	0.625	0.263	valid
X1.7	0.621	0.263	valid
X1.8	0.696	0.263	valid
X1.9	0.606	0.263	valid
X1.10	0.427	0.263	valid
X1.11	0.591	0.263	valid
X1.12	0.706	0.263	valid
X1.13	0.603	0.263	valid
X1.14	0.596	0.263	valid
X1.15	0.645	0.263	valid
X1.16	0.435	0.263	valid
X1.17	0.597	0.263	valid

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari masing masing item dari setiap variabel kompetensi guru menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 17. Hasil Uji Validitas Variabel Kedisiplinan Guru

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
X2.1	0.561	0.263	valid
X2.2	0.666	0.263	valid
X2.3	0.655	0.263	valid
X2.4	0.462	0.263	valid
X2.5	0.684	0.263	valid
X2.6	0.703	0.263	valid
X2.7	0.672	0.263	valid
X2.8	0.661	0.263	valid
X2.9	0.611	0.263	valid
X2.10	0.631	0.263	valid
X2.11	0.739	0.263	valid
X2.12	0.814	0.263	valid
X2.13	0.749	0.263	valid
X2.14	0.620	0.263	valid
X2.15	0.688	0.263	valid

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari masing masing item dari setiap variabel kedisiplinan guru menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 18. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan Pendidikan

Item	r-hitung	r-tabel	keterangan
Y.1	0.294	0.263	valid
Y.2	0.545	0.263	valid
Y.3	0.732	0.263	valid
Y.4	0.759	0.263	valid
Y.5	0.743	0.263	valid
Y.6	0.413	0.263	valid
Y.7	0.355	0.263	valid
Y.8	0.525	0.263	valid
Y.9	0.473	0.263	valid
Y.10	0.748	0.263	valid

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari masing masing item dari setiap variabel kualitas layanan pendidikan menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas.

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variable yang diringkas pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Hasil Uji Reliabilitas Data Setiap Variabel

Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
Kompetensi Guru (X1)	0.877	Reliabel
Kedisiplinan Guru (X2)	0.908	Reliabel
Kualitas Layanan Pendidikan (Y)	0.765	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa nilai alpha dari masing masing variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur dari masing masing variabel dari kuesioner adalah reliable. Sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

2. Uji Asumsi Klasik.

a. Uji Multikolinieritas.

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang sempurna antar variabel bebas dalam model regresi. Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10 % maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 20. Hasil Uji Multikolinieritas

NO	VARIABEL BEBAS	NILAI TOLERANCE	NILAI VIF (%)
1	Kompetensi Guru (X1)	0.894	1.119
2	Kedisiplinan Guru (X2)	0.894	1.119

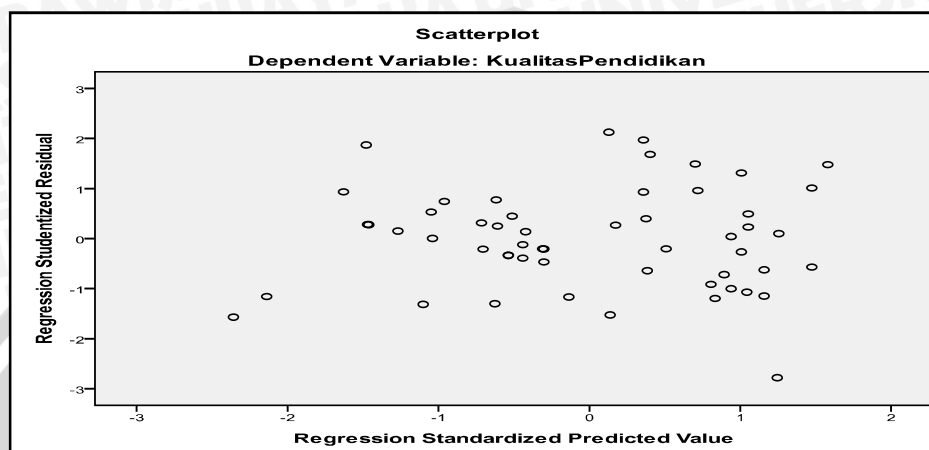
Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas dalam penelitian ini lebih kecil dari 10 yang masing-masing variabel bebas baik dari kompetensi guru maupun kedisiplinan menunjukkan nilai 1,119. Sedangkan nilai toleransi semua variabel bebas kurang dari 10 % yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 90 %, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan metode grafik Scatterplot yang dihasilkan dari output program SPSS versi 19, Apabila pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka

hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada model regresi



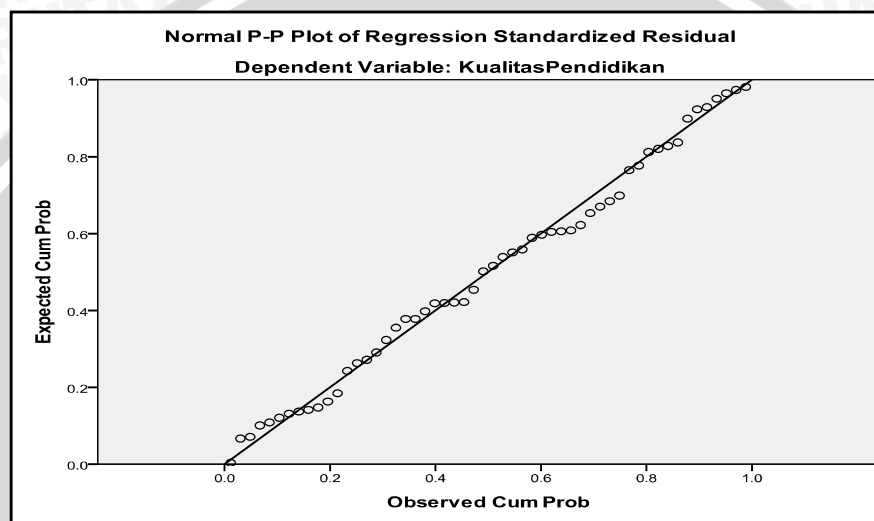
Gambar 4. Output SPSS mengenai Uji Heterokedastisitas
Sumber : Data Olahan, 2014

Dari grafik tersebut terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

c. Uji Normalitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal ataukah tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 5. Output SPSS mengenai hasil uji normalitas
Sumber : Data Olahan, 2014

Dari gambar tersebut didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal, sebaran data berada disekitar garis diagonal.

d. Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda Model persamaan regresi yang baik adalah yang memenuhi persyaratan asumsi klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari gejala multikolinieritas dan terbebas dari heterokedastisitas. Dari analisis sebelumnya telah terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan dalam penelitian ini sudah dianggap

baik. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi berganda dengan program SPSS 19 diperoleh hasil seperti tabel dibawah ini

Tabel 21 Hasil Uji Untuk Menentukan Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1.351	8.598				.157
KompetensiGuru	.259	.095	.341	2.736	.009	.894	1.119
KedisiplinanGuru	.281	.109	.321	2.572	.013	.894	1.119

a. Dependent Variable: KualitasPendidikan

Sumber : Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2x_2$$

$$Y = 1,351 + 0,341 X_1 + 0,321 X_2$$

Keterangan:

Y = variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kualitas layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu yang nilainya akan diprediksi oleh Kompetensi Guru dan Kedisiplinan guru

$a = 1,351$ merupakan nilai konstanta, yaitu estimasi dari kualitas layanan pendidikan di sma negeri 1 cepu, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan di sma negeri 1 cepu memiliki nilai sebesar 1,351

$b_1 = 0,341$ merupakan slope atau koefisien arah variabel kompetensi guru (x_1) yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di SMA negeri 1 cepu (y), artinya variabel kompetensi berpengaruh positif sebesar 0,341 terhadap kualitas pendidikan jika variabel lain dianggap konstan.

$b_2 = 0,321$ merupakan slope atau koefisien arah variabel kedisiplinan yang mempengaruhi kualitas pendidikan (Y), artinya variabel kedisiplinan berpengaruh positif sebesar 0,321 terhadap kualitas layanan pendidikan jika variabel lain dianggap konstan.

e = merupakan nilai residua tau kemungkinan kesalahan dari model persamaan regresi, yang disebabkan karena adanya kemungkinan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel kualitas layanan pendidikan tetapi tidak dimasukkan dalam model persamaan.

X_1 = Kompetensi Guru

X_2 = Kedisiplinan Guru

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Variabel kompetensi guru dan kedisiplinan guru mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah.

- 2) Koefisien kompetensi guru memberikan nilai sebesar 0,341 yang berarti bahwa jika gaya kompetensi guru semakin baik dengan asumsi variabel lain tetap maka kualitas layanan pendidikan sekolah akan mengalami peningkatan.
- 3) Koefisien kedisiplinan guru memberikan nilai sebesar 0,321 yang berarti bahwa jika kedisiplinan guru semakin tinggi dengan asumsi variabel lain tetap maka kualitas layanan pendidikan akan mengalami peningkatan

E. Pengujian Hipotesis.

1. Uji F (pengujian Hipotesis Secara Simultan)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 22 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	319.559	2	159.779	10.449	.000 ^a
	Residual	779.867	51	15.292		
	Total	1099.426	53			

a. Predictors: (Constant), KedisiplinanGuru, KompetensiGuru

b. Dependent Variable: KualitasPendidikan

Sumber : Data Olahan, 2014

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 10,449 yang mana lebih besar dari F tabel yaitu

3,168. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kompetensi guru dan kedisiplinan guru mempunyai pengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 23 Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.539 ^a	.291	.263	3.91044

a. Predictors: (Constant), KedisiplinanGuru, KompetensiGuru

b. Dependent Variable: KualitasPendidikan

Sumber : Data Olahan, 2014

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2) yang diperoleh sebesar 0,263. Hal ini berarti 26,3% variasi variabel kualitas layanan pendidikan sekolah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi

guru dan kedisiplinan guru, sedangkan sisanya sebesar 73,7% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

3. Uji t (Uji Hipotesis Secara Parsial)

Hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan menggunakan uji parsial. Dengan nilai t tabel sebesar 2,004 maka agar hipotesis diterima nilai t hitung harus lebih besar dari t tabel. Selain itu Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p-value), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 24 Hasil Uji T

Variabel Bebas	t-hitung	Sig. t
Kompetensi Guru (X1)	2.736	0.009
Kedisiplinan Guru (X2)	2.572	0.013

Sumber : Data Olahan, 2014

Uji Hipotesis 1 (H1)

Perumusan hipotesis:

Ho : $\rho = 0$ tidak ada pengaruh positif antara kompetensi guru dengan kualitas pendidikan sekolah

Ha : $\rho > 0$ terdapat pengaruh positif antara kompetensi guru dengan kualitas pendidikan sekolah

Dari tabel 24 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis kompetensi guru menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,736 yang lebih besar 2,004 dan dengan taraf signifikansi 0,009. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_1 “kompetensi guru mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan sekolah” diterima.

Uji Hipotesis 2 (H_2)

Perumusan hipotesis:

H_0 : $\rho = 0$ tidak ada pengaruh positif antara kedisiplinan guru dengan kualitas pendidikan sekolah

H_a : $\rho > 0$ terdapat pengaruh positif antara kedisiplinan guru dengan kualitas pendidikan sekolah

Dari tabel 24 juga terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis kedisiplinan guru menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,572 yang lebih besar dari 2,004 dan dengan taraf signifikansi 0,013. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a . Dengan demikian dapat berarti bahwa hipotesis H_1 “kedisiplinan guru mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan sekolah” diterima.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel bebas berpengaruh terhadap

variabel terikat. Pengaruh yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin baik kompetensi guru dan kedisiplinan guru maka mengakibatkan semakin tinggi pula kualitas pendidikan sekolah yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi guru terhadap kualitas layanan pendidikan.

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap kualitas pendidikan sekolah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,736 yang lebih besar daripada t tabel yaitu 2,004 dan dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,009 tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa kompetensi guru berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan sekolah. Artinya bahwa ada pengaruh kompetensi guru terhadap kualitas pendidikan di SMA N 1 Cepu Kabupaten Blora.

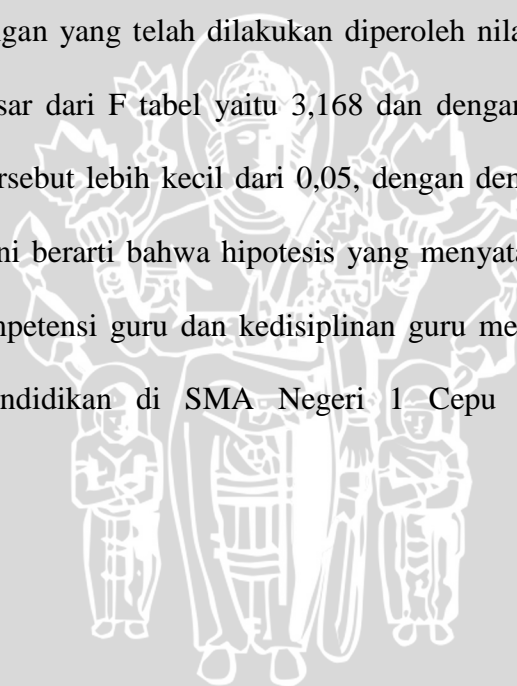
2. Pengaruh kedisiplinan guru terhadap kualitas layanan pendidikan.

Hasil pengujian hipotesis (H2) telah membuktikan terdapat pengaruh antara kedisiplinan guru terhadap kualitas pendidikan sekolah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 2,572 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,013 tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Pengujian ini secara statistik membuktikan

bahwa kedisiplinan guru berpengaruh positif terhadap kualitas pendidikan sekolah. Artinya bahwa ada pengaruh kedisiplinan guru terhadap kualitas pendidikan di SMA N 1 Cepu Kabupaten Blora.

3. Pengaruh Kompetensi Guru dan Kedisiplinan Terhadap Kualitas layanan Pendidikan.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara kompetensi guru dan kedisiplinan guru terhadap kualitas pendidikan sekolah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 10,449 yang lebih besar dari F tabel yaitu 3,168 dan dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kompetensi guru dan kedisiplinan guru mempunyai pengaruh terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Guru yang ada di SMA Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora tentang Pengaruh Kompetensi Guru dan Kedisiplinan guru terhadap kualitas pendidikan sekolah, serta berdasarkan pada perhitungan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda maka dapat diketahui dan di kemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara kompetensi guru dengan kualitas layanan pendidikan Sekolah. Pengujian membuktikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah. Dilihat dari perhitungan regresi linier berganda yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,341 dan nilai t hitung sebesar 2,736 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,009 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o . Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator kompetensi guru, dari 5 (lima) indikator kompetensi guru yaitu latar belakang pendidikan, penguasaan teknologi, pengalaman organisasi, komunikasi dan sertifikasi indikator yang paling kuat adalah latar belakang pendidikan dan yang masih lemah adalah pengalaman organisasi.

2. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara kedisiplinan guru dengan kualitas pendidikan Sekolah. Pengujian membuktikan bahwa kedisiplinan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas layanan pendidikan sekolah. Dilihat dari perhitungan regresi linier berganda yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,321 dan nilai t hitung sebesar 2,572 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,013 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o . Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator kedisiplinan guru, dari 4 (empat) indikator yaitu tingkat kehadiran, tepat waktu, pelaksanaan tata tertib, dan komitmen terhadap tugas indikator yang paling kuat adalah tingkat kehadiran dan indikator yang masih lemah adalah pelaksanaan tata tertib.
3. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh antara Kompetensi Guru dan Kedisiplinan guru dengan kualitas layanan pendidikan Sekolah. Pengujian membuktikan bahwa kompetensi dan kedisiplinan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan sekolah. Dilihat dari perhitungan nilai F hitung sebesar 10,449 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_o .
4. Kompetensi guru memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Cepu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi (SMA N 1 Cepu)

Berdasarkan penarikan kesimpulan dapat dilihat bahwa kompetensi guru merupakan pengaruh paling kuat bagi kualitas pendidikan sekolah. Dengan demikian untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan maka perlu adanya peningkatan kualitas dari pendidik terutama yang berkaitan dengan kompetensi. Selama ini peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penataran, maupun dalam musyawarah guru mata pelajaran yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik ditingkat Kabupaten Blora atau tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ada baiknya Sekolah secara berkala melakukan Diklat, penataran dan pembekalan secara mandiri sehingga bahan yang akan diberikan oleh pemberi diklat, penataran atau pembekalan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan nantinya akan mampu untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri jika dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi nantinya juga akan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru, maka dari itu guru yang belum memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar harus belajar untuk menggunakan teknologi seperti laptop, penggunaan internet, tablet pc, maupun penggunaan LCD agar tidak tertinggal oleh guru yang sudah bisa menggunakannya.

Tingkat Kedisiplinan Guru walaupun pengaruhnya tidak sebesar dari kompetensi guru juga memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMA Negeri 1 Cepu. Penerapan absensi sidik jari (*Finger Print*) yang sudah berjalan hampir satu hendaknya tetap dilaksanakan dengan mempertahankan apa yang sudah baik dan meningkatkan dinovasi yang lebih baik dari saat ini. Pada awalnya penerapan absensi sidik jari ini hanya sekedar absen datang dan pulang saja tanpa ada pengolahan data. Namun Seiring berjalannya waktu pengolahan data dari absensi ini sudah berjalan dengan baik dengan menghubungkan *server* dari absensi ini dengan kepala sekolah melalui komputer yang dimiliki kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa mengevaluasi masalah kedisiplinan guru.

2. Bagi Peneliti selanjutnya.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan akan semakin banyak penelitian Administrasi Publik yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan. Pada penelitian ini berdasarkan hasil uji R^2 sebesar 0,263 yang artinya kompetensi dan kedisiplinan guru hanya menjelaskan 26,3 % dari hal hal yang mempengaruhi kualitas layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan masih ada variabel-variabel lain sebanyak 73,7% yang harus diperhatikan dalam penelitian selanjutnya. Untuk penelitian lebih lanjut, hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Karena semakin baik kualitas pendidikan yang salah satunya diukur dari kualitas lulusan maka akan bermanfaat bagi lulusan itu sendiri karena mereka akan melanjutkan sekolah atau langsung bekerja, bermanfaat untuk Sekolah Tinggi dan Universitas, serta bermanfaat bagi masyarakat.

